

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI PEMANFAATAN KANAL KOMUNIKASI DIGITAL
BAGI GENERASI MUDA GUNA MEWUJUDKAN
KONSOLIDASI DEMOKRASI**

Oleh :

Tri Haksoro, S.A.P.

Kolonel inf NRP 11940014400970

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2024**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-nya, penulis sebagai salah satu peserta program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul; “OPTIMALISASI PEMANFAATAN KANAL KOMUNIKASI DIGITAL BAGI GENERASI MUDA GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXVI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Albertus Magnus Putut Prabantoro, S.H. Taprof Bid. Idiologi Lemhannas RI dan tim penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikannya sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademik, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya

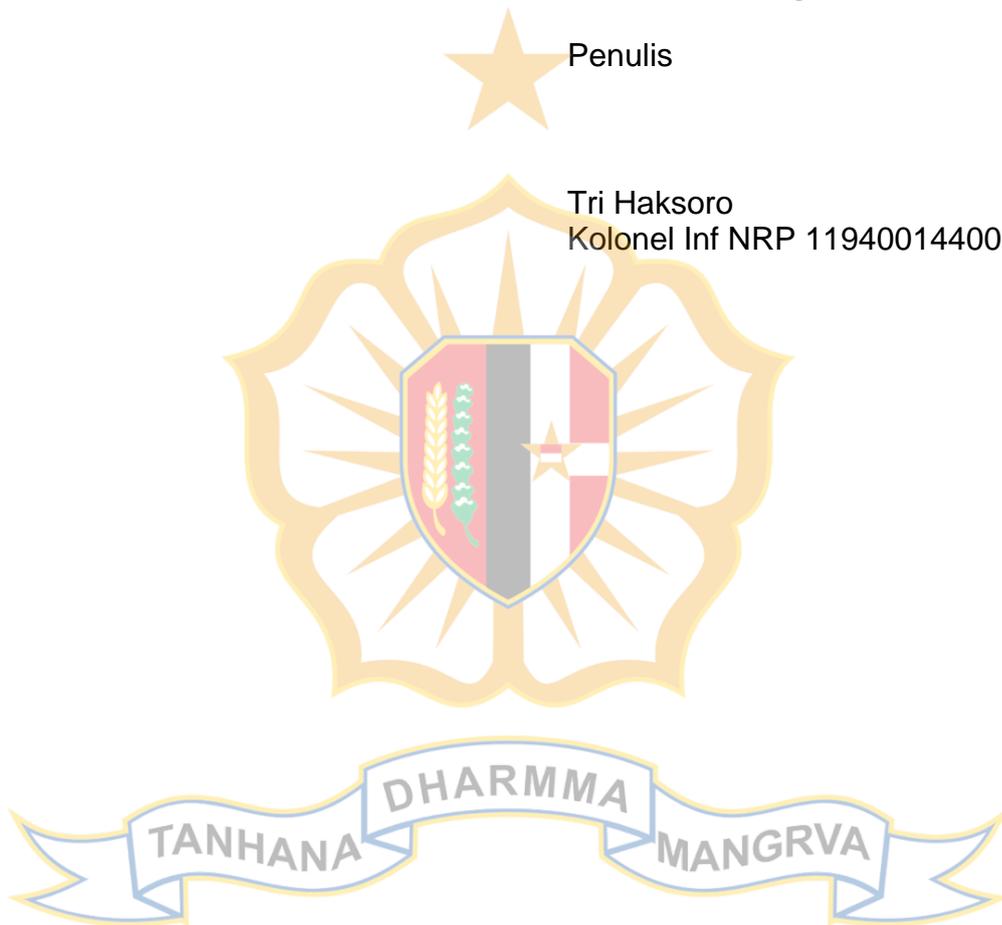
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan

Sekian dan terima kasih, Wassalaamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, Agustus 2024

Penulis

Tri Haksoro
Kolonel Inf NRP 11940014400970



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Haksoro

Pangkat : Kolonel Inf

Jabatan : Pamen Denmabesad

Instansi : Mabesad

Alamat : Jl Veteran No.5 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXVI tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2024

Penulis

Tri Haksoro
Kolonel Inf NRP 11940014400970

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Tri Haksoro

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI

Judul Taskap : OPTIMALISASI PEMANFAATAN KANAL KOMUNIKASI
DIGITAL BAGI GENERASI MUDA GUNA MEWUJUDKAN
KONSOLIDASI DEMOKRASI

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2024 karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk diuji.

"coret yang tidak diperlukan"



Albertus Magnus Putut Prabantoro. S.H.
Taprof Bid. Idiologi Lemhannas RI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	8
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	13
7. Umum	13
8. Peraturan dan Perundang-undangan	14
9. Data/Fakta	18
10. Kerangka Teoritis	28
11. Lingkungan Strategis	30
BAB III PEMBAHASAN	42

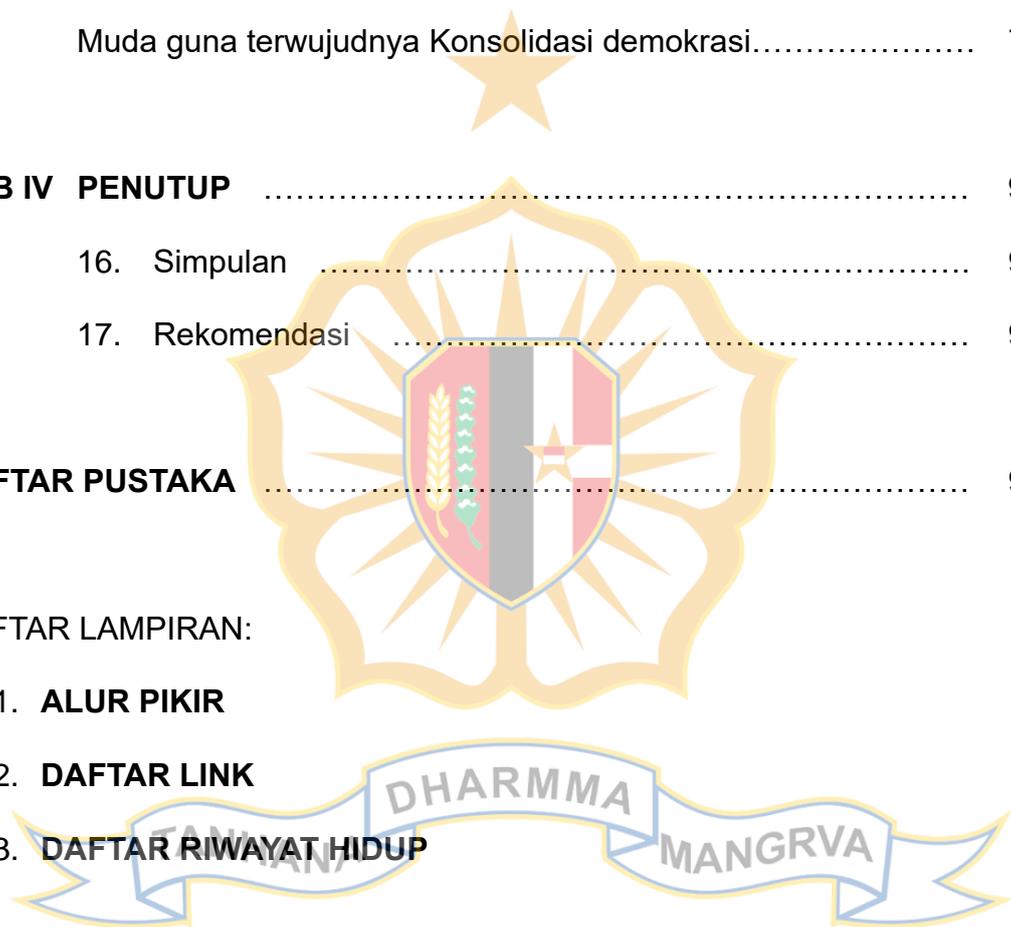
12. Umum	42
13. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemanfaatan Kanal Komunikasi Digital	44
14. Identifikasi Penyebab Terwujudnya konsolidasi demokrasi Dan dampaknya untuk Demokrasi digital.....	64
15. Strategi Pemanfaatan Kanal Komunikasi Digital oleh Generasi Muda guna terwujudnya Konsolidasi demokrasi.....	76

BAB IV PENUTUP	90
16. Simpulan	90
17. Rekomendasi	93

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR LINK
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konsolidasi demokrasi adalah proses yang berkelanjutan untuk memperkuat dan memantapkan sistem demokrasi di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, generasi muda memiliki peran sebagai agen perubahan dan penerus estafet kepemimpinan bangsa. Partisipasi aktif generasi muda dalam proses politik menjadi kunci penting dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan.¹ Di era digital yang semakin maju, kanal komunikasi digital telah menjadi ruang publik baru yang memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam wacana politik, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Media sosial, platform berbagi konten, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital lainnya telah menjadi sarana yang efektif bagi generasi muda untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, mengakses informasi, dan berinteraksi dengan aktor-aktor politik.²

Sebelum maraknya penggunaan kanal komunikasi digital, interaksi politik lebih banyak terjadi melalui saluran-saluran tradisional seperti partai politik, organisasi massa, dan media massa konvensional. Namun, dengan munculnya internet dan media sosial, ruang publik digital telah menjadi arena baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Generasi muda, yang tumbuh dengan teknologi digital, menjadi pengguna aktif platform-platform ini dan berperan sebagai agen perubahan dalam lanskap politik. Berdasarkan informasi bahwa pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta, dengan 68,9% di antaranya adalah pengguna aktif media sosial.³ Dari jumlah tersebut, generasi muda (usia 18-35 tahun) merupakan kelompok pengguna terbesar, mencapai

¹ Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.

² Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge University Press.

³ We Are Social & Hootsuite. (2023). *Digital 2023: Indonesia*.

sekitar 49,5% dari total pengguna internet.⁴ Pemilu 2024 akan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menguji efektivitas pemanfaatan kanal komunikasi digital dalam proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa pemilih pemula dan generasi muda diperkirakan mencapai 52% dari total pemilih pada Pemilu 2024.⁵ Namun, optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dalam konteks Pemilu 2024 masih menghadapi berbagai tantangan. Isu-isu seperti penyebaran informasi palsu (hoax), polarisasi politik di media sosial, dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan signifikan.⁶ Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 64,8% pemilih muda di Indonesia pernah terpapar informasi palsu terkait politik melalui media sosial.⁷ Di sisi lain, kanal komunikasi digital juga menawarkan peluang besar dalam mendorong partisipasi politik generasi muda. Platform media sosial dan aplikasi pesan instan telah menjadi sarana efektif untuk kampanye politik, edukasi pemilih, dan mobilisasi suara. Beberapa inisiatif digital seperti "Ayo Vote" dan "Kawalpemilu" telah menunjukkan potensi teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.⁸

Anggraini (2024) dengan mengutip studi Tujuan demokratisasi saat ini, menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), adalah mencapai demokrasi yang matang pada tahun 2029. Oleh karena itu, Pemilu 2024 menjadi agenda penting dalam tahapan konsolidasi demokrasi karena merupakan tahap pengembangan demokrasi selanjutnya. Mengingat kematangan demokrasi akan diikuti oleh penguatan kelembagaan, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan kepastian hukum, perjalanan demokrasi Indonesia akan memiliki banyak prospek saat ini. Melihat komposisi demografi dan usia produktif Indonesia, peningkatan

⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Laporan Survei Internet APJII 2021-2022.

⁵ Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2023). Proyeksi Pemilih Pemula dan Generasi Muda Pemilu 2024.

⁶ Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.

⁷ Juditha, C. (2023). Pemilih Muda dan Informasi Palsu Terkait Politik: Studi Kasus Menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 14(1), 45-62.

⁸ Sinpeng, A. (2022). *Digital Democracy in Southeast Asia: Technology, Politics and Disruption*. Cambridge University Press.

pemilih muda lebih dari 55% pada Pemilu 2024 menjadi hal yang sangat penting karena akan berdampak pada lanskap politik dan rencana strategis jangka panjang negara ini.⁹

Generasi muda, dengan teknologi digital memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kanal komunikasi digital dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Namun, optimalisasi pemanfaatan kanal ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis maupun sosial-budaya.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dalam konteks konsolidasi demokrasi. Beberapa akademisi berpendapat bahwa generasi muda tidak selalu bersikap apatis terhadap apa yang diyakininya, melainkan keterlibatan generasi muda dalam menyampaikan aspirasi politik sebenarnya telah teralihkan pada media baru, yaitu Kanal komunikasi digital, seperti media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok), platform pesan instan (WhatsApp, Telegram), dan forum online, telah menjadi ruang publik baru bagi generasi muda untuk berinteraksi, berpendapat, dan mengakses informasi terkait politik.¹¹ Pemanfaatan kanal-kanal ini belum optimal dalam mendorong partisipasi politik yang bermakna dan membangun konsolidasi demokrasi. Generasi muda telah mendapatkan tempat untuk menunjukkan eksistensi diri memainkan media sosial dengan kreatif. Kendati demikian tidak selamanya media sosial memberikan dampak positif bagi partisipasi politik generasi muda.

Konsolidasi demokrasi merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan media. Dalam konteks pemanfaatan kanal komunikasi digital, roadmap konsolidasi demokrasi dapat mencakup: **Peningkatan literasi digital:** Membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menciptakan konten digital secara kritis. **Pengembangan infrastruktur digital:** Memastikan akses internet yang

⁹ Anggraini, D. (2024). Pemilu 2024 selesai, Perlukah Konsolidasi Demokrasi? Departemen Ilmu

¹⁰ nnett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739-768.

¹¹ Henry Subiakto, *Politik Digital: Komunikasi Politik dan Demokrasi di Era Digital*, (Jakarta: Kencana, 2021).

merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. **Penguatan regulasi:** Menyempurnakan kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. **Peningkatan partisipasi politik:** Memfasilitasi partisipasi politik generasi muda melalui platform digital. **Penguatan pengawasan terhadap media sosial:** Memastikan platform media sosial bertanggung jawab atas konten yang beredar di platform mereka.

Seiring dengan banyak berkembangnya kanal komunikasi digital terdapat permasalahan dalam pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Permasalahan itu antara lain meliputi; kesenjangan digital, literasi digital, disinformasi, malinformasi, misinformasi dan hoaks serta polarisasi politik digital.¹² Kesenjangan akses dan penggunaan teknologi digital antara kelompok sosial yang berbeda, menjadi hambatan utama dalam partisipasi politik generasi muda. Kemudian Kurangnya kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, membedakan fakta dari opini, dan mengenali disinformasi membuat generasi muda rentan terhadap manipulasi dan propaganda politik. Beredarnya Informasi yang salah dan menyesatkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, memperdalam polarisasi politik, dan menghambat partisipasi politik yang sehat. Oleh karena itu, untuk menjaga dan mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah. Dibutuhkan keselarasan kanal komunikasi digital antara kanal komunikasi pemerintah dan kanal komunikasi generasi muda, sehingga apa yang disampaikan pesan pemerintah melalui media sosial dapat diterima oleh generasi muda.

Dalam pemilihan kanal komunikasi digital diperlukan beberapa pendekatan antara lain melalui pemahaman etika yang kuat, pendidikan media digital, literasi digital dan regulasi yang terkait dengan konteks konsolidasi demokrasi.¹³ Generasi muda, sebagai pengguna aktif kanal komunikasi digital, memiliki peran strategis dalam mewujudkan konsolidasi

¹² Sukma, R. (2019). Polarisasi Politik di Media Sosial: Studi Kasus Pilpres 2019. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 101-115.

¹³ Kominfo. (2021). *Indeks Literasi Digital Indonesia 2021*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

demokrasi. Melalui media sosial, platform berbagi video, forum diskusi online, dan berbagai aplikasi lainnya. Melalui kanal komunikasi digital generasi muda dapat Membuat konten kreatif yang menginspirasi, mengedukasi, dan mengajak masyarakat sekitar untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mengikuti diskusi publik online, memberikan masukan kepada pemerintah melalui kanal-kanal resmi, dan terlibat dalam kampanye-kampanye positif berkaitan dengan isu politik dan sosial, Menggalang solidaritas untuk membantu sesama, membangun jaringan pertemanan lintas budaya, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi dan kerukunan.

Dalam pemanfaatan kanal komunikasi digital tentunya harus selaras dengan empat konsensus dasar bernegara Indonesia yaitu; Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, menjadi fondasi dalam pemanfaatan kanal komunikasi digital. Hak-hak dasar dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, warga negara, termasuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kanal komunikasi digital memberi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan aspirasi politiknya sesuai dengan jaminan konstitusional.¹⁴ Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, kanal komunikasi digital dapat menjadi jembatan yang menghubungkan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.¹⁵ Platform seperti "Indonesia Youth Connect" memfasilitasi dialog antar-daerah, memperkuat pemahaman keberagaman, dan membangun solidaritas nasional.¹⁶ Melalui Kanal Komunikasi digital memberi peluang bagi generasi muda untuk meyatukan keberagaman sekaligus membangun kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tuggal Ika. Dengan berlandaskan pada empat konsensus dasar bernegara, generasi muda dapat mengoptimalkan platform digital untuk memperkuat partisipasi

¹⁴ Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.

¹⁵ Haryanto, H. C., Rahmania, T., Mubarok, A. R., Nakon, A. B., & Pratama, B. (2019). Peran Media Sosial dalam Penguatan Identitas Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 344-366.

¹⁶ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. (2023). Laporan Tahunan Program Indonesia Youth Connect.

politik, meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, dan membangun kohesi sosial.

Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital bagi generasi muda menjadi hal yang penting dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kertas Karya Perorangan (TASKAP) ini akan membahas secara mendalam faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan kanal komunikasi digital, identifikasi faktor pengaruh terwujudnya konsolidasi demokrasi, serta perumusan strategi efektif dalam memanfaatkan kanal komunikasi digital untuk memperkuat partisipasi politik generasi muda. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dalam taskap ini penulis mengambil judul “ **Optimalisasi Pemanfaatan Kanal Komunikasi Digital Bagi Generasi Muda Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi**”

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang serta fakta kondisi yang terjadi, Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam Taskap ini adalah “**Bagaimana Mengoptimalkan Kanal Komunikasi Digital Bagi Generasi Muda Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi?**”

Dalam rangka menjawab dan menemukan solusi sebagaimana yang tertuang dalam merumuskan permasalahan dan isu penelitian yang akan dibahas dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) tercantum dalam urutan berikut:

- a. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi?
- b. Bagaimana mengidentifikasi penyebab yang mempengaruhi terwujudnya konsolidasi demokrasi dari pemanfaatan kanal komunikasi digital dan dampaknya untuk Demokrasi digital?
- c. Bagaimana Strategi dalam pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda guna terwujudnya konsolidasi demokrasi?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran, analisis, pembahasan, dan rekomendasi mengenai optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital bagi generasi muda guna mewujudkan konsolidasi demokrasi.
- b. **Tujuan.** Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangpempikiran kepada para pembuat kebijakan dalam optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital guna mewujudkan konsolidasi demokrasi.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup Taskap ini dibatasi pada Generasi Y atau Milenials dan GenerasiZ dalam optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital guna terwujudnya Konsolidasi Demokrasi.

- b. **Sistematika.** Penulisan Tugas ini dibagi menjadi empat BAB yang saling berhubungan satu dengan yang lain, disusun mengguakan sistematika berikut ini;

1) **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini mencakup berbagai definisi beserta penjelasan singkat tentang sejarah masalah, konseptualisasi, tujuan, dan maksud, serta jangkauan sistematika dan pengertian-pengertian serta teknik penulisan dan pendekatan yang digunakan.

2) **Bab II : LANDASAN PEMIKIRAN**

Dalam Bab ini akan dijelaskan kerangka berpikir penulisan taskap ini dalam membahas permasalahan yang ada, diantaranya meliputi beberapa peraturan hukum, informasi dan fakta, dan struktur teoritis rumusan masalah dari literatur dan referensi yang ada. Pertumbuhan dan dampak lingkungan strategis pada skala global, regional, dan nasional kemudian akan dibahas berdasarkan kekuatan internal dan eksternal.

3) **Bab III : PEMBAHASAN**

Setiap pertanyaan studi dalam pembahasan optimasi utama akan dibahas secara menyeluruh dan mudah dipahami dalam bab ini, terkait pemanfaatan kanal komunikasi digital bagi generasi muda sehingga terwujudnya konsolidasi demokrasi. Dalam pembahasan ini akan terkait dengan teori sebagaimana telah diuraikan di Bab terdahulu. Hasil pembahasan dalam Taskap ini melalui analisa yang akan menghasilkan rumusan pemecahan pokok-pokok bahasan dengan solusi yang logis, konkret dan konseptual.

4) **Bab IV : PENUTUP**

Bab ini, yang berfungsi sebagai simpulan TASKAP, menawarkan sejumlah saran dan rekomendasi yang harus dipertimbangkan oleh para Pembuat kebijakan, Lembaga Pendidikan, Organisasi Masyarakat Sipil, Media Massa dan Generasi muda.

5. **Metode dan Pendekatan**

- a. **Metode.** Metode yang dilakukan dalam menyusun Taskap ini adalah analisis kualitatif berdasarkan analisis data dan penyajian fakta yang didasarkan pada studi pustaka, analisa Taskap ini menggunakan analisis PESTLE.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menyusun Taskap ini adalah komprehensif integral dengan kajian multidisiplin yang sesuai dengan kerangka teori yang diterapkan, dan dari sudut pandang kepentingan nasional.

6. **Pengertian.**

Pengertian-pengertian berikut digunakan dalam penulisan tugas ini untuk mencegah kesalahpahaman dan mencoba menyelaraskan persepsi dalam diskusi:

- a. **Optimalisasi.** Machfud Sidik (2001), Optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang

besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan.

- b. Transformasi digital**, disebut sebagai perubahan yang melibatkan teknologi digital untuk mengubah cara kerja, beroperasi, maupun berinteraksi. Dalam meningkatkan transformasi digital menjadi lebih efisien dan inovatif, diperlukannya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- b. Media Komunikasi**, adalah Media komunikasi mencakup berbagai alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti media cetak dan media audio visual. Dalam konteks digital, media komunikasi juga melibatkan komunitas maya dan komunikasi nonverbal sebagai bagian dari proses komunikasi digital.¹⁷
- c. Cyberpolitics** adalah Dalam konteks komunikasi digital, cyberpolitics melibatkan penggunaan berbagai platform online seperti media sosial, blog, situs web, dan aplikasi pesan instan untuk tujuan politik,¹⁸ yang mencakup aktivitas seperti kampanye digital, debat politik di media sosial, penyebaran informasi politik, dan mobilisasi massa melalui platform digital.¹⁹
- d. Demokrasi digital**, Gilardi (2016), menunjukkan bagaimana teknologi digital berdampak pada proses demokrasi itu sendiri dalam artikelnya tentang Demokrasi Digital. Telah terjadi perubahan dalam mobilisasi politik, taktik kampanye, polarisasi opini publik, dan bahkan saluran dan teknologi pemerintah. Salah satu cara untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses politik dan pemerintahan adalah melalui demokrasi digital. Di dunia yang sempurna, Internet akan memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan keinginan mereka melalui banyak saluran komunikasi pemerintah, yang mengarah pada terciptanya undang-undang dan peraturan.

¹⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/media-komunikasi/>

¹⁸ Coleman, S. (2004). *The Political System in the Digital Age*. Routledge.

¹⁹ Margolis, M., & Resnick, D. (2000). *Politics as Usual: The Cyberspace Revolution*. Sage Publications.

- e. **Digital Knowledge Index** atau **indeks literasi digital nasional**, adalah instrumen pengukuran dengan empat pilar utama: budaya digital, keterampilan digital, etika digital, dan keamanan digital.
- f. **Konsolidasi Demokrasi**. Konsolidasi demokrasi adalah sebuah (metode) memadukan beberapa komponen demokrasi untuk membantu mendorong demokratisasi politik. Lembaga politik, elit, kelompok kepentingan, komunitas politik, dan partai politik merupakan faktor-faktor dalam pengembangan demokrasi (O'Donnel dan Schmitter, 1993: 24-6).
- g. **Sistem Komunikasi**, adalah Sistem komunikasi mencakup berbagai teknologi dan alat komunikasi, seperti televisi digital, satelit, telepon seluler, dan jaringan data mobile. Sistem komunikasi juga melibatkan konsep-konsep seperti dunia maya, komunitas maya, dan komunikasi nonverbal dalam konteks digital²⁰
- h. **Website**: Website adalah halaman web yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan. Website dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyediakan informasi tentang perusahaan, produk, dan layanan, serta untuk membangun hubungan dengan pelanggan.
- i. **Email**: Email adalah cara yang umum digunakan untuk berbicara dengan klien dan pihak berkepentingan lainnya. Email dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengirimkan informasi tentang perusahaan, produk, dan layanan, serta untuk membangun hubungan dengan pelanggan.
- j. **Media sosial**: Media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain dan berbagi informasi. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membangun kesadaran merek, mempromosikan produk dan layanan, dan berinteraksi dengan pelanggan.
- k. **Kanal Komunikasi Digital**. Alami et al., (2022), Kanal komunikasi digital adalah platform online yang telah memunculkan perkembangan terkini, khususnya konsep “demokrasi digital.” Bahkan

²⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-komunikasi/>

dalam banyak kasus, diakui bahwa keberadaan kanal komunikasi digital, telah berkembang menjadi salah satu elemen penentu proses konsolidasi demokrasi secara digital.

- I. **Optimalisasi (Nurrohman 2017).** Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- m. **Kepribadian.** Individualitas, Menurut Kurniawaty (2008), Phares mendefinisikan kepribadian sebagai pola unik berupa perasaan, ide, dan perilaku yang membedakan seseorang dengan orang lain dan tetap konstan sepanjang waktu dan dalam berbagai konteks.
- n. **Persona (Jati diri).** Menurut Waterman (1984), identitas didefinisikan sebagai citra diri yang unik yang terdiri dari nilai-nilai, keyakinan, dan daftar tujuan yang harus dicapai seseorang. Komitmen ini tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu karena tujuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang harus dijunjung tinggi dianggap penting untuk memberikan arah, makna, dan tujuan hidup (LeFrancois, 1993).
- o. **Generasi Muda.** Hartini dan Kartasapoetra: Mengartikan generasi muda sebagai generasi muda yang bertugas meneruskan pembangunan negaranya dan hidup selama jangka waktu tertentu untuk melanjutkan pembangunan bangsanya. Di Indonesia generasi muda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara yang berusia 16 hingga 30 tahun.²¹ Beberapa generasi muda yang populer saat ini menurut para ahli/pakar antara lain: Generasi Milenial (lahir antara 1981-1996):²² Generasi yang tumbuh di era teknologi digital dan globalisasi, dikenal dengan karakteristiknya yang ambisius, percaya diri, dan menghargai keseimbangan hidup. Generasi Z (lahir antara 1997-2012):²³ Generasi yang lahir di era internet dan media sosial, dikenal dengan karakteristiknya yang kreatif, mandiri, dan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

²² Neil Howe dan William Strauss, *Millennials Rising: The Next Great Generation* (2000).

²³ David Stillman dan Jonah Stillman, *Gen Z @ Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace* (2017).

peduli terhadap isu-isu sosial.

- p. **Generasi Y (Millennials).** Menurut Haroviz (2012), generasi Y atau yang disebut sebagai generasi millennial adalah sekelompok anak-anak muda yang lahir pada awal tahun 1980 hingga awal tahun 2000 an. Generasi ini juga nyaman dengan keberagaman, teknologi, dan komunikasi online untuk tetap terkoneksi dengan teman-temannya
- q. **Generasi Z.** Generasi Z merupakan generasi yang haus teknologi dan telah terpapar teknologi dan internet sejak usia dini, menurut Noordiono (2016). Air tawar merupakan teknologi baru; Anda harus segera meminumnya untuk merasakan manfaatnya. Generasi digital, yang terkadang disebut sebagai Generasi Z, bergantung pada teknologi dan berbagai perangkatnya seiring pertumbuhan dan perkembangan mereka.
- r. **Komunikasi Digital (Berelson & Steiner).** Komunikasi digital sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, atau emosi melalui simbol-simbol digital seperti kata-kata, gambar, atau angka. Simbol-simbol ini kemudian ditafsirkan oleh penerima pesan untuk membangun makna.
- s. **Pemanfaatan Kanal Komunikasi.** Manuel Castells (Sosiolog dan Ahli Teori Komunikasi): Castells mendefinisikan pemanfaatan kanal komunikasi digital sebagai "penggunaan jaringan komunikasi berbasis komputer dan teknologi digital untuk menciptakan, mendistribusikan, dan mengakses informasi." Ia menekankan bahwa hal ini telah menciptakan "masyarakat jaringan" di mana kekuatan informasi menjadi kunci dalam dinamika sosial dan politik.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat. Keterlibatan aktif generasi muda dalam proses demokrasi menjadi esensial untuk menjaga keberlangsungan dan kemajuan bangsa. Pada era digital ini, kanal komunikasi digital menawarkan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dan berkontribusi dalam konsolidasi demokrasi. Kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi telah membuka ruang baru bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses demokrasi. Kanal komunikasi digital seperti media sosial, platform online, dan aplikasi pesan instan telah menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi, menggalang partisipasi, dan membangun solidaritas.

Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat mempermudah proses demokrasi dengan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan pengawasan. Penggunaan media sosial juga dapat memunculkan tantangan baru seperti polarisasi masyarakat dan regresi demokrasi.²⁴ Pemilu 2024 telah menunjukkan peningkatan partisipasi politik publik, terutama generasi muda, yang dipengaruhi oleh pemanfaatan media dan teknologi. Tantangan lain seperti polarisasi masyarakat dan regresi demokrasi juga muncul. Komunikasi digital dapat memperkuat atau memperlemah demokrasi, tergantung pada bagaimana teknologi digunakan. Penggunaan teknologi dapat mempermudah pertukaran gagasan dan meningkatkan partisipasi politik, tetapi juga dapat memunculkan masalah seperti kontrol suara rakyat yang ingin kritis terhadap pihak berkuasa.²⁵

Penggunaan data digital dapat memperkuat konsolidasi demokrasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi menjadi penting untuk memastikan keamanan informasi dan mencegah manipulasi data. Generasi muda dikenal

²⁴ Nuraeni, Nuraeni1906kencana@gmail.com. (2024). Peran Media Sosial Dalam Demokrasi Masa Kini. *Tuturan*, 2(1), 216-222. DOI: <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i4.777>

²⁵ Kompas.id. (2022). Demokrasi Era Digital. Kompas.id.

dengan sifatnya yang aktif, kreatif, dan terkoneksi dengan teknologi. Kelompok masyarakat ini merupakan potensi besar sebagai agen perubahan dan penggerak kemajuan demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan proses memperkuat dan memantapkan sistem demokrasi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial. Penggunaan teknologi digital telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda.

Dalam konteks demokrasi, pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dapat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat konsolidasi demokrasi. Partisipasi dalam proses politik dan penyampaian pendapat kini lebih mudah diakses oleh masyarakat termasuk para generasi muda melalui teknologi komunikasi digital, dalam hal ini dapat melalui media sosial, platform online, dan alat kolaborasi.²⁶ Platform media sosial juga memfasilitasi keterlibatan langsung antara anggota masyarakat dengan tokoh politik, pemerintah dan lembaga demokrasi lainnya, sehingga menciptakan saluran komunikasi dua arah yang sebelumnya tidak bisa dilakukan.²⁷ Oleh karena itu Optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda merupakan kunci penting dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi.

8. Peraturan Perundang-undangan

Pemanfaatan kanal digital oleh generasi muda dalam mencapai konsolidasi demokrasi membutuhkan acuan dan aturan perundang-undangan yang terkait:

- a. **UUD NRI 1945 (Amandemen) pasal 28F.** Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk Setiap orang memiliki kebebasan untuk menciptakan lingkungan sosial dan

²⁶Kruse, L. M., Norris, D. R., & Flinchum, J. R. (2018). Social media as a public sphere? Politics on social media. *Sociological Quarterly*, 59(1), 62–84. <https://doi.org/10.1080/00380253.2017.1383143>

²⁷Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (2020). Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter. *Studying Politics Across Media*, 50–74. <https://doi.org/10.4324/9780429202483-4>

pribadinya sendiri serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi melalui media apa pun. Untuk menjamin agar setiap orang dapat memperoleh informasi, maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Mengingat hak atas informasi merupakan hak asasi manusia dan perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, maka fungsi yang maksimal tersebut mutlak diperlukan.²⁸

- b. **UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.** Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 menandai babak baru dalam regulasi dunia digital Indonesia. Perubahan kedua atas UU ITE ini merupakan langkah signifikan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan teknologi yang pesat serta dinamika masyarakat di ruang digital.²⁹ Memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan informasi dan transaksi elektronik. Memperkuat perlindungan hak asasi manusia di ruang digital, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari ujaran kebencian serta informasi yang salah. Diharapkan UU ITE dapat menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam menjaga ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Selain itu, UU ITE yang baru juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi informasi.
- c. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memiliki peran penting dalam konteks optimalisasi penguatan

²⁸ https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf

²⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

kanal komunikasi digital bagi generasi muda untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi. UU KIP menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, yang merupakan aspek fundamental dalam demokrasi. Dalam era digital, implementasi UU KIP semakin relevan dengan pemanfaatan kanal komunikasi digital. Generasi muda, sebagai pengguna aktif platform digital, dapat memanfaatkan hak akses informasi yang dijamin oleh UU ini untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dari lembaga-lembaga publik.³⁰

Bagi generasi muda yang merupakan *digital natives* (orang-orang yang lahir dan tumbuh di era digital), UU ini memberikan landasan hukum untuk mengakses dan memanfaatkan informasi publik melalui platform digital. Dengan adanya jaminan akses informasi, generasi muda dapat lebih aktif dalam menggunakan kanal komunikasi digital untuk mencari, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang relevan dengan isu-isu demokrasi. Keterbukaan informasi mendorong diskusi publik yang lebih berkualitas di platform digital, memungkinkan generasi muda untuk terlibat dalam dialog demokratis yang konstruktif. Implementasi UU KIP dalam konteks digital mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda, yang penting untuk partisipasi yang efektif dalam demokrasi modern.

d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memiliki peran krusial dalam mendukung optimalisasi penguatan kanal komunikasi digital bagi generasi muda untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. PP ini

³⁰ Retnowati, E. (2012). "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)." *Perspektif*, 17(1), 54-61.

mengatur berbagai aspek penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, yang menjadi landasan penting bagi pengembangan dan pemanfaatan kanal komunikasi digital.³¹ Dalam penguatan kanal komunikasi digital bagi generasi muda, PP PSTE memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Hal ini menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya, yang sangat penting bagi partisipasi aktif generasi muda dalam ruang demokrasi digital. Sedangkan dalam konsolidasi demokrasi, PP PSTE juga mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik, hal ini mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, yang merupakan elemen penting dalam memperkuat demokrasi. Generasi muda dapat memanfaatkan sistem-sistem ini untuk mengakses informasi publik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

- e. **Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.** PERPRES No. 32 Tahun 2024: Tonggak Baru Jurnalisme Berkualitas di Era Digital Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau lebih dikenal sebagai Perpres Publisher Rights, menandai era baru dalam industri media dan jurnalisme di Indonesia.³² Ditetapkan pada 20 Februari 2024 oleh Presiden Joko Widodo, Perpres ini hadir sebagai respons terhadap dinamika industri media yang semakin dipengaruhi oleh platform digital. Perpres Publisher Rights bertujuan untuk menciptakan ekosistem media yang adil dan berkelanjutan, di mana karya jurnalistik dihargai dan

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 2.

³² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

dihormati secara proporsional.³³ Inti dari peraturan ini adalah kewajiban platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers dalam menyajikan berita berkualitas dan memberikan kompensasi yang adil atas konten berita yang ditampilkan di platform mereka. Perpres Publisher Rights disambut baik oleh berbagai pihak, terutama insan pers dan perusahaan media, yang melihatnya sebagai langkah penting dalam menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas di era digital. Namun, beberapa pihak juga menyuarakan kekhawatiran terkait implementasi dan potensi dampaknya terhadap kebebasan berekspresi di platform digital.

9. Data dan Fakta.

Guna memperkuat pembahasan serta sebagai dasar pertimbangan dalam menganalisis pemanfaatan kanal komunikasi digital bagi generasi muda dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, maka disajikan beberapa data dan fakta sebagai berikut:

a. **Penetrasi Internet dan Penggunaan Media Sosial di Kalangan Generasi Muda.**

1) Statistik penggunaan internet global dan nasional.

Secara global, berdasarkan laporan terbaru dari International Telecommunication Union (ITU) menunjukkan bahwa 95% populasi muda di negara maju dan 86% di negara berkembang memiliki akses internet,³⁴ angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 3% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan tren pertumbuhan yang konsisten sejak dekade lalu. Terkait dengan jenis perangkat yang digunakan, smartphone tetap menjadi perangkat utama untuk mengakses internet. Secara global, 97,8% pengguna internet muda mengakses internet melalui perangkat mobile.³⁵

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ We Are Social & Hootsuite. (2024). Digital 2024: Global Digital Overview.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Hasil survei tentang penetrasi internet masyarakat Indonesia dari tahun 2018 pada angka 64.80%, tahun 2020 naik menjadi 73.70%, tahun 2022 naik menyentuh pada angka 77.01%, tahun 2023 sebanyak 78.19%. Sedangkan hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,50%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,31% dari tahun 2023 sebesar 78,19%. Dilihat dari usia, hasil survei diperoleh data sebagai berikut; Generasi Pre Boomer penetrasi internet sebanyak 32% dengan kontribusi 0,24%, Generasi Baby Boomers penetrasi internet sebanyak 60,52% dengan kontribusi 6,58%, Generasi X penetrasi internet sebanyak 83,69% dengan kontribusi 18,98%, Generasi Y (Melenials) penetrasi internet sebanyak 93,17% dengan kontribusi 30,62%, Generasi Z penetrasi internet sebanyak 87,02% dengan kontribusi 34,40% dan Generasi Post Z (alpha) penetrasi internet sebanyak 48,10% dengan kontribusi 9,17%. Jika dilihat dari segi usia, peringkat tertinggi ada pada generasi milenial dan generasi Z dengan tingkat kontribusi Jumlah penduduk yang mengakses internet sebesar 65,02% (Sumber: APJII, 2024).

2) Tren penggunaan media sosial oleh generasi muda.

Penggunaan media sosial di kalangan generasi muda terus mengalami perubahan dinamis sepanjang tahun 2023 dan 2024. Hal ini mencerminkan pergeseran preferensi platform, pola interaksi, dan tujuan penggunaan media sosial di kalangan pengguna berusia 16-24 tahun. Tahun 2023, berdasarkan laporan Global Digital Overview menunjukkan bahwa 95,8% pengguna internet usia 16-24 tahun aktif menggunakan media

sosial, angka ini meningkat menjadi 97,2% pada tahun 2024, hal ini menunjukkan penetrasi yang hampir menyeluruh.³⁶ Media sosial Tiktok terus mendominasi preferensi generasi muda, tahun 2023, 63% pengguna media sosial usia 16-24 tahun menggunakan TikTok secara aktif, meningkat menjadi 68% pada 2024.³⁷ Peningkatan penggunaan media sosial Tiktok ini disebabkan oleh fitur-fitur baru Tiktok yang mendukung pembelajaran dan keterlibatan sosial.

Media sosial Instagram, meskipun mengalami sedikit penurunan, tetap menjadi platform populer. Penggunaan aktif di kalangan generasi muda turun dari 76% pada 2023 menjadi 72% pada 2024.³⁸ Penurunan ini dikaitkan dengan peralihan sebagian pengguna ke platform yang lebih fokus pada konten video pendek. YouTube tetap menjadi platform video yang dominan, dengan 89% pengguna muda mengakses platform ini secara teratur pada 2023, meningkat menjadi 91% pada 2024.³⁹ Peningkatan ini dikaitkan dengan pertumbuhan konten edukatif dan tutorial di platform tersebut. Sementara itu, Facebook mengalami penurunan signifikan di kalangan generasi muda. Penggunaan aktif turun dari 51% pada 2023 menjadi 45% pada 2024.⁴⁰ Penurunan ini mencerminkan kecenderungan generasi muda untuk beralih ke platform yang lebih dinamis dan visual. Twitter (kini dikenal sebagai X) juga mengalami fluktuasi, penggunaan di kalangan generasi muda turun dari 42% pada 2023 menjadi 38% pada 2024.⁴¹ Namun, platform ini tetap relevan untuk diskusi topik-topik terkini dan aktivitas digital. Tren-tren ini menunjukkan bahwa media sosial semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari generasi muda, tidak hanya sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga sebagai

³⁶ We Are Social & Hootsuite. (2024). Digital 2024: Global Digital Overview.

³⁷ Pew Research Center. (2024). Teens, Social Media and Technology 2024.

³⁸ Ibid

³⁹ GlobalWebIndex. (2024). Social Media Trends Among Gen Z.

⁴⁰ Pew Research Center. (2024). Teens, Social Media and Technology 2024.

⁴¹ Ibid.

platform untuk pembelajaran dan keterlibatan sosial-politik.

3) Preferensi platform digital di kalangan pemuda.

Preferensi platform digital di kalangan pemuda terus berevolusi, mencerminkan perubahan teknologi dan tren sosial. Data terkini menunjukkan pola yang menarik dalam penggunaan berbagai platform digital oleh generasi muda, terutama mereka yang berusia 16-24 tahun. TikTok mendominasi preferensi pemuda dengan 72% pengguna aktif dalam kelompok usia ini. Popularitas TikTok didorong oleh algoritma personalisasi yang kuat dan format konten video pendek yang menarik. Platform ini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga semakin banyak dimanfaatkan untuk edukasi informal dan aktivitas digital.⁴² Instagram, meskipun mengalami sedikit penurunan, tetap menjadi platform utama dengan 68% pengguna aktif di kalangan pemuda.⁴³ Fitur Reels yang terinspirasi dari TikTok membantu mempertahankan relevansi Instagram di tengah persaingan yang ketat.

YouTube sebagai sumber utama konten video panjang, dengan 88% pemuda mengakses platform ini secara teratur. Peningkatan konten edukatif dan tutorial di YouTube memperkuat posisinya sebagai platform pembelajaran informal yang populer.⁴⁴ Media Snapchat, meskipun tidak sepopuler beberapa tahun lalu, masih memiliki basis pengguna yang solid di kalangan pemuda dengan 59% pengguna aktif. Fitur privasi dan konten yang menghilang tetap menjadi daya tarik utama platform ini. Twitter (X) mengalami fluktuasi pengguna, namun tetap relevan untuk diskusi topik terkini dan aktivitas digital dengan 42% pengguna aktif di kalangan pemuda. Dalam konteks messaging, WhatsApp dan Telegram tetap menjadi pilihan utama untuk komunikasi pribadi dan kelompok. Namun,

⁴² Anderson, M., & Jiang, J. (2024). Teens, Social Media & Technology 2024. Pew Research Center.

⁴³ We Are Social & Hootsuite. (2024). Digital 2024: Global Digital Overview.

⁴⁴ Ibid.

aplikasi seperti Signal juga mulai mendapatkan traksi di kalangan pemuda yang lebih sadar privasi.⁴⁵ Dilihat dari segi fungsi, multi-tasking menjadi norma baru, pemuda cenderung menggunakan berbagai platform secara bersamaan untuk tujuan yang berbeda, TikTok untuk hiburan, Instagram untuk social currency, YouTube untuk pembelajaran, dan LinkedIn untuk pengembangan karir. Preferensi ini juga mencerminkan perubahan dalam konsumsi konten. Format video pendek (kurang dari 60 detik) menjadi sangat populer, dengan 73% pemuda menyatakan lebih suka mengonsumsi konten dalam format ini. Namun, untuk topik yang lebih mendalam atau edukatif, format video yang lebih panjang di YouTube atau podcast tetap populer.

b. Partisipasi Politik Digital Generasi Muda

1) Tingkat keterlibatan politik Digital.

Partisipasi politik digital generasi muda mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu di Indonesia dalam kurun waktu 2023-2024, hal ini menunjukkan potensi besar kanal komunikasi digital dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 91,5% pengguna internet di Indonesia berusia 16-64 tahun, dengan 98,3% di antaranya mengakses media sosial.⁴⁶ Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada awal 2024 menemukan bahwa 76% responden generasi muda terlibat dalam diskusi politik digital setidaknya sekali seminggu, meningkat dari 62% pada tahun 2022.⁴⁷ Peningkatan ini menunjukkan bahwa kanal komunikasi digital semakin berperan penting dalam membentuk kesadaran dan

⁴⁵ App Annie. (2024). State of Mobile 2024 Report.

⁴⁶ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan Survei Internet APJII 2022-2023.

⁴⁷ Lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI), Lapran Sruvei awal 2024

partisipasi politik generasi muda. Dalam konteks pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan bahwa pada Pemilu 2024, sekitar 85% pemilih muda (17-35 tahun) menggunakan aplikasi digital KPU untuk mengakses informasi tentang kandidat dan proses pemilu, meningkat tajam dari 57% pada Pemilu 2019.⁴⁸ Ini menunjukkan efektivitas kanal digital dalam menyebarkan informasi politik kepada generasi muda. Studi yang dilakukan oleh *Center for Digital Society* Universitas Gadjah Mada pada pertengahan 2023 menemukan bahwa 68% responden generasi Z menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan pendapat politik mereka, dengan Twitter, Instagram, dan TikTok menjadi platform yang paling populer.⁴⁹ Hal ini menunjukkan potensi besar media sosial sebagai kanal komunikasi politik bagi generasi muda.

2) Bentuk-bentuk aktivitas digital.

Aktivitas digital di Indonesia mengalami perkembangan pesat selama periode 2023-2024, menunjukkan peran signifikan kanal komunikasi digital dalam memberdayakan generasi muda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Berbagai bentuk aktivitas digital muncul dan berkembang, mencerminkan kreativitas dan keterlibatan aktif generasi muda dalam isu-isu sosial dan politik. Bentuk aktivitas digital dalam partisipasi demokrasi antara lain ; Petisi Online: Platform Change.org Indonesia melaporkan peningkatan 63% dalam jumlah petisi yang dibuat oleh pengguna berusia 18-35 tahun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.⁵⁰ Topik-topik populer meliputi reformasi pendidikan, perlindungan lingkungan, dan transparansi pemerintahan.

Kampanye Hashtag: *Studi oleh Center for Innovation Policy and Governance (CIPG)* menunjukkan bahwa

⁴⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). Laporan Penggunaan Aplikasi KPU dalam Pemilu 2024.

⁴⁹ Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. (2023). Studi Perilaku Politik Digital Generasi Z di Indonesia.

⁵⁰ Change.org Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Petisi Online 2023.

penggunaan hashtag untuk kampanye sosial-politik meningkat 78% selama periode 2023-2024.⁵¹ Kampanye seperti #IndonesiaBebasPlastik dan #ReformasiDikorupsi menjadi viral dan mendorong diskusi publik yang luas. Podcast Politik: Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Podcast Indonesia pada awal 2024 menemukan bahwa 65% pendengar podcast politik berusia 18-35 tahun, dengan peningkatan 40% dalam jumlah podcast politik yang diluncurkan selama tahun 2023.⁵² Bentuk-bentuk aktivitas digital ini menunjukkan bahwa penguatan kanal komunikasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda dan mendukung konsolidasi demokrasi. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, penyebaran disinformasi, dan keamanan siber tetap perlu diatasi untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan bermakna.

3) Pengaruh media sosial terhadap perilaku politik pemuda.

Media sosial telah menjadi instrumen yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku politik generasi muda di Indonesia selama periode 2023-2024. Pengaruh ini memiliki implikasi signifikan terhadap upaya optimalisasi kanal komunikasi digital untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi. Survei Nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada akhir 2023 menunjukkan bahwa 94% pemuda Indonesia menggunakan media sosial secara aktif, dengan rata-rata waktu penggunaan 4,2 jam per hari. Dari jumlah tersebut, 78% mengaku bahwa media sosial menjadi sumber utama mereka dalam memperoleh informasi politik.⁵³ Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi pemilih muda pada

⁵¹ Center for Innovation Policy and Governance (CIPG). (2024). Studi Tren Kampanye Digital di Indonesia 2023-2024.

⁵² Asosiasi Podcast Indonesia. (2024). Survei Pendengar Podcast Politik 2023-2024.

⁵³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023.

Pemilu 2024. Tingkat partisipasi pemilih generasi muda mencapai 83%, meningkat dari 71% pada Pemilu 2019. KPU mengaitkan peningkatan ini dengan kampanye #SuaraPemudaUntukIndonesia yang viral di media sosial.⁵⁴

Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa 72% responden pemuda mengaku bahwa diskusi politik di media sosial mempengaruhi preferensi politik mereka, Platform yang paling berpengaruh adalah Instagram (37%), TikTok (28%), dan Twitter (22%).⁵⁵ Dalam optimalisasi kanal komunikasi digital, terutama media sosial, berpotensi besar dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda dan mendukung konsolidasi demokrasi. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital, memerangi disinformasi, dan memastikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dalam konteks politik.

c. **Penggunaan Kanal Komunikasi Digital**

1) Jenis Platform digital yang di gunakan.

Dalam periode 2023-2024, penggunaan platform digital di kalangan generasi muda Indonesia mengalami perkembangan signifikan, dengan berbagai jenis platform memainkan peran penting dalam komunikasi politik dan partisipasi demokratis. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada akhir 2023 menunjukkan bahwa 97% generasi muda menggunakan setidaknya satu platform digital secara aktif, dengan penggunaan platform digital sebagai berikut: Instagram: 89% , TikTok: 85%, WhatsApp: 83%, YouTube: 78%, Twitter: 62%, Facebook: 58%, dan Telegram: 45%.⁵⁶ Sedangkan We Are Social dan Hootsuite untuk Indonesia 2024 mencatat peningkatan 40% dalam

⁵⁴ Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). Laporan Partisipasi Pemilih Pemilu 2024.

⁵⁵ Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Preferensi Politik Generasi Muda Indonesia.

⁵⁶ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023.

penggunaan fitur "Stories" di Instagram dan "Reels" di TikTok untuk konten politik oleh influencer dan organisasi politik, dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adaptasi strategi komunikasi politik terhadap preferensi format konten generasi muda.⁵⁷ Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan bahwa selama Pemilu 2024, engagement di platform digital meningkat 65% dibandingkan Pemilu 2019, Hashtag #PemiluDigital2024 menjadi viral di berbagai platform, menandakan peran signifikan media sosial dalam proses elektoral.⁵⁸ Dari hasil lembaga survei menunjukkan optimalisasi penguatan kanal komunikasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda dan mendukung konsolidasi demokrasi.

2) Pola Penggunaan Media sosial

Pola penggunaan media sosial dikalangan generasi muda Indonesia mengalami perubahan signifikan selama periode 2023-2024, mencerminkan potensi besar kanal komunikasi digital dalam mendukung konsolidasi demokrasi. Survei Nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada akhir 2023 menunjukkan bahwa 97% generasi muda (usia 18-35 tahun) menggunakan media sosial secara aktif, dengan rata-rata waktu penggunaan meningkat menjadi 4,5 jam per hari, naik dari 3,8 jam pada tahun 2022.⁵⁹ Peningkatan ini menunjukkan semakin pentingnya media sosial sebagai kanal komunikasi bagi generasi muda. Studi oleh Burson Cohn & Wolfe (BCW) Indonesia menemukan bahwa 73% generasi muda lebih cenderung mempercayai informasi politik yang dibagikan oleh influencer atau tokoh publik di media sosial daripada sumber berita tradisional. Dari data-data tersebut, menunjukkan

⁵⁷ Kemp, S. (2024). Digital 2024: Indonesia. We Are Social & Hootsuite

⁵⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). Laporan Penggunaan Media Digital dalam Pemilu 2024.

⁵⁹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023.

bahwa optimalisasi penguatan kanal komunikasi digital, terutama media sosial, memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda dan mendukung konsolidasi demokrasi

3) Efektivitas Kampanye Politik Digital.

Kampanye politik digital telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menjangkau dan mempengaruhi generasi muda Indonesia selama periode 2023-2024. Fenomena ini menegaskan pentingnya optimalisasi kanal komunikasi digital dalam upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada akhir 2023 mengungkapkan bahwa 92% pemilih muda terpapar kampanye politik melalui platform digital, dengan 78% menyatakan bahwa kampanye digital mempengaruhi preferensi politik mereka. Berdasarkan temuan data ini menunjukkan potensi besar kanal digital dalam membentuk opini politik generasi muda. Studi Puskapol UI (Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia) selama Pemilu 2024 menemukan bahwa kandidat yang aktif menggunakan media sosial dan kampanye digital memperoleh dukungan 35% lebih tinggi di kalangan pemilih muda dibandingkan kandidat yang mengandalkan metode kampanye konvensional. Platform yang paling efektif adalah Instagram (41%), TikTok (32%), dan YouTube (18%).⁶⁰

10. Kerangka Teoritis.

Era digital yang terus berkembang, peran teknologi komunikasi dalam membentuk lanskap politik dan demokrasi menjadi semakin signifikan. Kanal komunikasi digital telah menjadi sarana utama untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskursus publik, dan terlibat dalam proses demokrasi.⁶¹ Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting

⁶⁰ Puskapol UI. (2024). Studi Efektivitas Kampanye Digital dalam Pemilu 2024.

⁶¹ Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media,

tentang bagaimana optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital dapat mendukung konsolidasi demokrasi di kalangan generasi muda. Dukungan konsolidasi demokrasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi optimalisasi kanal komunikasi digital, dapat menjadi kanal komunikasi digital politik. Untuk memahami dinamika ini secara komprehensif, diperlukan kerangka teoritis yang menggabungkan berbagai perspektif dari ilmu politik, komunikasi, dan sosiologi. Dalam pembahasan ini akan mengintegrasikan tiga teori yang relevan sebagai berikut; Teori Konsolidasi Demokrasi, Teori Komunikasi Politik Digital, dan Teori Demokrasi Digital.

a. Teori Konsolidasi Demokrasi (Juan J. Linz dan Alfred Stepan).

Teori konsolidasi demokrasi yang dikembangkan oleh ilmuwan politik Juan J. Linz dan Alfred Stepan, menekankan pentingnya memperkuat institusi demokratis, memperluas partisipasi politik, dan membangun budaya demokrasi yang kuat.⁶² Dalam konteks digital, teori ini dapat diperluas dengan mempertimbangkan bagaimana teknologi komunikasi baru dapat mendukung atau menghambat proses konsolidasi demokrasi. Pemanfaatan kanal komunikasi digital secara optimal baik oleh pelaku kegiatan politik dan /atau generasi muda dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Selain itu, generasi muda perlu dibekali dengan literasi digital yang memadai agar pemanfaatan komunikasi digital dilakukan secara kritis dan bertanggung jawab. Ini mencakup kemampuan untuk membedakan informasi yang valid, mengenali bias, dan menghindari penyebaran disinformasi. Juan J. Linz dan Alfred Stepan meyakini pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda memiliki potensi besar untuk mempercepat proses konsolidasi demokrasi. Dengan peningkatan literasi digital, meningkatnya partisipasi politik, memperkuat pemantauan dan pengawasan, serta memperkuat masyarakat sipil dalam mengawal integritas pemilu, generasi muda

political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143-150.

⁶² Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Johns Hopkins University Press.

dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.⁶³

b. Teori Komunikasi Politik Digital (Andrew Chadwick dan Philip N. Howard).

Teori Komunikasi Politik digital dikembangkan oleh Andrew Chadwick dan Philip N. Howard. Teori ini mengkaji bagaimana teknologi digital mengubah dinamika komunikasi politik. Teori ini menekankan pentingnya platform media sosial, aplikasi seluler, dan kanal digital lainnya dalam membentuk diskursus publik serta mobilisasi politik terhadap kalangan generasi muda.⁶⁴ Komunikasi politik saat ini terjadi dalam lingkungan media yang hibrid, di mana media konvensional berinteraksi dengan media digital. Interaksi ini menciptakan dinamika baru dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi politik. Melalui teknologi digital, memungkinkan personalisasi komunikasi politik yang lebih besar, di mana individu dapat memilih dan mengonsumsi informasi politik yang sesuai dengan preferensi dan minatnya. Hal ini juga membuka peluang baru bagi partisipasi politik, gerakan sosial secara digital, atau bahkan kampanye politik digital.

c. Teori Demokrasi Digital (Dahlberg & Papacharissi).

Teori Demokrasi Digital, yang dikembangkan Lincoln Dahlberg dan Zizi Papacharissi, mengeksplorasi potensi teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi demokratis dan menciptakan ruang politik publik virtual.⁶⁵ Teori ini membahas bagaimana internet dan platform digital dapat memfasilitasi deliberasi publik, meningkatkan transparansi pemerintah, dan memberdayakan warga

⁶³ Linz, Juan J., and Alfred Stepan. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

⁶⁴ Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.

⁶⁵ Dahlberg, L. (2001). The Internet and Democratic Discourse: Exploring the prospects of online deliberative forums extending the public sphere. *Information, Communication & Society*, 4(4), 615-633.

negara dalam proses politik.⁶⁶ Teknologi digital dapat memperluas dan mempermudah partisipasi publik dalam proses konsolidasi demokrasi melalui berbagai cara, seperti penggunaan media sosial untuk menyampaikan aspirasi, petisi online, atau partisipasi dalam forum diskusi online. Demokrasi digital juga menekankan pentingnya deliberasi atau musyawarah yang berkualitas. Teknologi digital dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan pendapat yang lebih luas, memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam diskusi publik yang lebih mendalam dan inklusif. Ruang publik digital sebagai arena penting bagi praktik demokrasi. Ruang publik digital dapat berupa platform media sosial, forum online, atau situs web yang memungkinkan warga untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik.

11. Lingkungan Strategis

- a. **Global.** Skandal *Cambridge Analytica Facebook* dan Operasi Senyap Rusia di Pilpres AS 2016.

Christopher Wylie, seorang *whistleblowers* yang dulunya bekerja di *Cambridge Analytica* baru saja memaparkan bagaimana perusahaan konsultan tersebut memanen data informasi lebih dari 50 juta pengguna akun Facebook. *Cambridge Analytica* merupakan perusahaan Inggris yang bergerak didata tambang dan data analisis yang berpusat di London. Perusahaan ini pada awalnya adalah perusahaan intellegensi militer dan perang psikologis (*Psychological warfare*). Keterlibatan Facebook dalam konflik *Cambridge Analytica* tidak lepas disebabkan karena kebocoran data pengguna pribadi Facebook yang berupa email, hobi, alamat, gender, *political references*, dan lainnya. Dengan data tersebut, *Cambridge Analytica* menggunakan teknik yang dinamakan sebagai *Behavioral Microtargeting* (BMT). BMT atau penentuan target berdasarkan

⁶⁶ Dahlberg, L. (2011). Re-constructing digital democracy: An outline of four 'positions'. *New Media & Society*, 13(6), 855-872. [4] Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*,

klasifikasi perilaku dengan menggunakan lima besar ciri kepribadian dalam psikologi guna menentukan kategori atau kelompok pengguna facebook. Pengategorian atau pengelompokan itu didasarkan pada metode OCEAN (*Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness, and Neuroticism*). OCEAN ini mewakili perilaku manusia dan menjelaskan dasar atau alasan setiap pengambilan keputusan.⁶⁷ Tujuan dari mengategorikan atau mengelompokkan agar dapat menargetkan data pengguna secara khusus berupa iklan, pesan, video, berita hingga disinformasi yang bersifat mendukung kampanye terhadap kandidat tertentu, yang nantinya akan memengaruhi keputusan para pemilih dan sebagai target iklan politik.

Hal tersebut terbukti saat Trump, Calon Presiden dari Partai Republik memenangkan *swing states* terhadap pemilih Florida dan Ohio, bahkan Pennsylvania yang merupakan negara bagian yang sering dimenangkan kandidat dari Partai Demokrat. Trump juga memenangkan Wisconsin, negara bagian yang diprediksi dapat dimenangkan oleh Hillary Clinton, yang berasal dari Partai Demokrat. Dengan kampanyenya yang penuh kontroversi, kemenangan Trump merupakan hal yang tidak terduga.⁶⁸ Diduga kuat skandal *Cambridge Analytica* ini didukung oleh keterlibatan pihak Rusia yang bertujuan menaikkan citra Trump dan menjelekkkan citra lawannya, termasuk Hillary. Operasi untuk mengganggu AS dilakukan sejak 2014. Tujuannya memicu perpecahan masyarakat dan memengaruhi pilihan politik AS. Intelijen Rusia menyebar anggota tim ke beberapa negara bagian, yaitu Nevada, California, New Mexico, Colorado, Illinois, Texas, Georgia, New York, dan Michigan. Negara-negara bagian yang didatangi adalah wilayah penting dalam pemilu. Wilayah tersebut dipilih karena menjadi arena pertarungan ketat kubu Partai Demokrat dengan Partai Republik. Dapat dikatakan wilayah tersebut

⁶⁷ Bofa, M., Wawan Budi, D., & Sudirman, A. (2022). Data Rights di Era Surveillance Capitalism: Skandal Data Cambridge Analytica & Facebook dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v2i2.22686>

⁶⁸ Maryoto, A. (2021). *Cambridge Analytica, Pegasus, dan Teknologi Pengancam Demokrasi*. Kompas.Com. https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/22/cambridge-analytica-pegasus-dan-teknologi-pengancam-demokrasi?open_from=Search_Result_Page

menjadi daerah *battle field* atau bahkan tidak bertuan karena tidak ada dominasi mayoritas partai di negara-negara bagian tersebut.⁶⁹

Operasi senyap lain yang dijalankan adalah menyelenggarakan gerakan mendukung Trump di Florida, New York, dan North Carolina. Materi konten adalah menjelekkan citra Hillary dan dua bakal calon presiden dari Partai Republik, Ted Cruz dan Marco Rubio. Jaringan Rusia juga membeli iklan di media sosial dan di berbagai laman internet. Melalui iklan-iklan itu, intelijen Rusia secara terbuka mendukung pencalonan Trump dan memojokkan Hillary. Melalui propaganda iklan, intelijen Rusia kemudian mengajak warga minoritas dengan target sasaran warga kulit hitam dan Muslim untuk tidak memilih Hillary. Jaringan Rusia juga mencuri nomor-nomor keamanan dan tanggal kelahiran warga AS untuk membuka akun pada platform digital berbayar, PayPal, dan mengunggah pesan di media sosial dengan menggunakan identitas palsu.⁷⁰

Kedua kasus ini menggambarkan bagaimana kanal komunikasi digital dapat disalahgunakan untuk memanipulasi proses demokrasi, terutama dengan memanfaatkan kerentanan generasi muda yang aktif di media sosial. Dengan memahami dan belajar dari skandal Cambridge Analytica dan operasi senyap Rusia, upaya optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dapat diarahkan untuk memperkuat, bukan melemahkan, proses demokrasi. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang mendukung partisipasi politik yang sehat, informasi yang akurat, dan dialog yang konstruktif, sehingga pada akhirnya mewujudkan konsolidasi demokrasi yang lebih kuat di era digital.

b. Regional.

1) Kemenangan Marcos Jr dalam Pemilu Filipina 2022.

Kemenangan Marcos Jr. dalam Pemilu Filipina 2022

⁶⁹ Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E. (2018). *The Cambridge Analytica files*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie-facebook-nix-bannon-trump>

⁷⁰ Yoga, A. (2018). *Menyingkap Konspirasi Rusia di Pilpres AS*. Kompas.Com. <https://www.kompas.id/baca/riset/2018/07/18/menyingkap-konspirasi-rusia-di-pilpres-as>

tidak terlepas dari strategi kampanye digital yang efektif, terutama dalam menjangkau generasi muda. Filipina, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia Tenggara, menjadi lahan subur bagi kampanye politik berbasis digital.⁷¹ Marcos Jr. dan tim kampanyenya memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan politik mereka. Penggunaan TikTok, Facebook, dan YouTube secara masif berperan besar dalam membentuk narasi positif tentang keluarga Marcos di kalangan pemilih muda.⁷² Konten-konten yang disajikan cenderung menonjolkan nostalgia era Marcos Sr. dan meminimalkan sejarah kelam rezim tersebut. 76% dari populasi Filipina adalah pengguna aktif media sosial. Sekitar 87% pemilih berusia 18-41 tahun menggunakan media sosial sebagai sumber informasi politik utama mereka.

Kampanye Marcos Jr. berhasil mengumpulkan lebih dari 13,7 juta pengikut di Facebook, jauh melampaui pesaingnya.⁷³ Penggunaan influencer dan micro-influencer lokal juga menjadi kunci keberhasilan kampanye digital Marcos Jr. Mereka berperan dalam menyebarkan pesan kampanye dengan cara yang lebih relatable bagi pemilih muda. Meskipun efektif, strategi kampanye digital Marcos Jr. juga menuai kontroversi. Beberapa pihak mengkritik penggunaan disinformasi dan manipulasi sejarah dalam konten-konten kampanye digital. Namun, kritik ini tidak cukup kuat untuk menghalangi kemenangan Marcos Jr. dalam pemilu. Kesuksesan kampanye digital Marcos Jr. menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap lanskap media yang berubah dalam politik kontemporer. Penggunaan kanal komunikasi digital yang efektif terbukti mampu memenangkan

⁷¹ Kemp, S. (2022). Digital 2022: The Philippines. DataReportal.

⁷² Ong, J. C., & Tapsell, R. (2022). Disinformation and digital authoritarianism in the Philippines. New Mandala.

⁷³ Palatino, M. (2022). How TikTok influenced the Philippine election. The Diplomat.

hati pemilih muda dan mengubah narasi politik secara signifikan.

2) *Thai Protest 2020* dan Gerakan Pro-Demokrasi Pemuda.

Protes Thailand 2020, yang didominasi oleh gerakan pro-demokrasi pemuda, menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Thailand. Gerakan ini menuntut reformasi monarki, pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-ocha, dan amandemen konstitusi. Salah satu faktor kunci yang mendorong kesuksesan gerakan ini adalah pemanfaatan strategis komunikasi digital. Gerakan pemuda menjadi ujung tombak protes, dengan siswa sekolah menengah dan mahasiswa memimpin demonstrasi dan memanfaatkan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Telegram untuk mengorganisir dan memobilisasi massa.⁷⁴

Protes Thailand juga terhubung dengan gerakan pro-demokrasi di negara-negara tetangga seperti Hong Kong dan Taiwan melalui tagar #MilkTeaAlliance, menunjukkan solidaritas dan berbagi taktik melalui komunikasi digital. Para pengunjung rasa menggunakan kreativitas digital untuk menyampaikan pesan mereka, termasuk meme internet, seni digital, dan video pendek yang viral untuk menarik perhatian dan menghindari sensor. Media sosial memungkinkan para pengunjung rasa untuk dengan cepat menyebarkan informasi tentang demonstrasi, mengumpulkan massa, dan mengkoordinasikan tindakan mereka. Komunikasi digital memungkinkan gerakan pro-demokrasi di Thailand untuk terhubung dengan gerakan serupa di negara lain, memperkuat pesan mereka dan mendapatkan dukungan internasional. Pemerintah Thailand berusaha membatasi komunikasi digital dengan memblokir situs web dan platform media sosial tertentu, tetapi para pengunjung rasa menemukan cara untuk

⁷⁴ Pavin Chachavalpongpun, "Thailand's Future Forward Party: The Rise and Fall of a Promising Pro-Democracy Party," ISEAS Perspective, No. 68 (2020).

mengatasi pembatasan ini, termasuk menggunakan VPN dan aplikasi perpesanan terenkripsi.⁷⁵ Protes Thailand 2020 menunjukkan kekuatan komunikasi digital dalam memobilisasi dan memperkuat gerakan sosial. Gerakan pemuda memanfaatkan teknologi digital secara inovatif untuk menantang status quo, menyuarakan tuntutan mereka, dan membangun solidaritas dengan gerakan pro-demokrasi lainnya di seluruh dunia. Meskipun menghadapi tantangan sensor dan penindasan, semangat dan kreativitas para pengunjuk rasa Thailand telah menginspirasi gerakan pro-demokrasi lainnya dan menunjukkan potensi komunikasi digital dalam mendorong perubahan sosial.

Kemenangan Marcos Jr di Filipina, protes di Thailand tahun 2020, dan gerakan pro-demokrasi pemuda memiliki keterkaitan dalam hal pemanfaatan media digital oleh generasi muda untuk tujuan politik. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa kanal komunikasi digital telah menjadi alat penting bagi generasi muda dalam aktivisme politik dan partisipasi demokrasi.

c. Nasional.

1) Politik identitas.

Politik identitas diprediksi akan terus menjadi bagian penting dalam narasi politik Indonesia menjelang pemilu serentak 2024. Faktor kondisi mental dan karakter akan memengaruhi strategi para kandidat dalam memperoleh dukungan yang kuat dari berbagai kelompok masyarakat. Kandidat atau partai politik akan menonjolkan identitas keagamaan mereka untuk menarik dukungan dari kelompok agama tertentu. Misalnya, menggunakan simbol-simbol agama dalam kampanye atau menjanjikan kebijakan yang menguntungkan kelompok agama mayoritas. Politik identitas dan penguatan kanal komunikasi digital telah menjadi dua

⁷⁵ Prachatai English, "Thai Government Blocks Access to Telegram Amid Protests," October 17, 2020.

topik yang sangat relevan dalam era digital saat ini. Politik identitas, yang berfokus pada perbedaan berdasarkan asumsi fisik, seperti agama, suku, ras, dan lain-lain, telah menjadi praktik yang umum dalam berbagai konteks, termasuk dalam kampanye politik.

Dalam konteks generasi muda, politik identitas dan penguatan kanal komunikasi digital memiliki dampak yang signifikan. Politik identitas dapat berupa praktik yang mengedepankan relasi emosional dan merendahkan pertimbangan rasional, sehingga dapat menimbulkan polarisasi dan diskriminasi antarkelompok. Hal ini dapat berdampak negatif pada kondisi sosial masyarakat, termasuk generasi milenial, yang cenderung tidak tertarik dengan isu politik identitas melalui media sosial.⁷⁶ Dengan adanya teknologi digital, informasi dan ide dapat tersebar luas dan cepat, sehingga memungkinkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Penguatan kanal komunikasi digital juga dapat membantu meningkatkan kesetaraan akses informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dan toleransi. Namun, penguatan kanal komunikasi digital juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat eksploitasi politik identitas. Misalnya, kontestan Pemilu dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan gagasan politik yang berbasis identitas, seperti sentimen etnis atau primordialisme. Hal ini dapat menimbulkan polarisasi dan diskriminasi antar kelompok, sehingga perlu diawasi dan diatur secara ketat.⁷⁷ Oleh karena itu, perlu diadakan upaya yang lebih efektif untuk mengawasi dan mengatur praktik politik identitas serta meningkatkan

⁷⁶ Fitriyah. (2020). Ruang Publik, Politik Identitas dan Kerumitan Komunikasi. *Jurnal Kontekstual*, 5(1), 1-

⁷⁷ Prasetya, A. (2019). Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu. *Prosiding Comnews*, 21(1), 1-12.

kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dan toleransi.

- 2) Permasalahan data Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) adalah sebuah inovasi penting dalam proses penghitungan suara di Indonesia. Dikembangkan sebagai penerus dari Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), Sirekap hadir dengan sejumlah pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akurasi dalam rekapitulasi hasil pemilu. SIREKAP menggunakan teknologi optical mark recognition (OMR) dan optical character recognition (OCR), sedangkan SITUNG tetap menggunakan teknologi pemindaian. Oleh karena itu, formulir Model C-KWK yang memuat hasil penghitungan suara TPS dibuat agar dapat dipindai oleh sistem menggunakan foto telepon pintar yang telah terpasang aplikasi Sirekap.

Sirekap yang juga dikenal dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sirekap didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses penghitungan suara. Sejumlah permasalahan dalam pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemilu (Sirekap) selama ini ditemukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Misalnya, pada Pilkada 2020, aplikasi SIREKAP berhasil digunakan di wilayah perkotaan atau tempat-tempat yang infrastruktur dan geografinya relatif sederhana, tetapi tidak berhasil di lokasi-lokasi yang geografi atau infrastruktur teknologinya masih sulit. Pelaksanaan pemilu di Indonesia Timur selama ini selalu

terkendala oleh pemanfaatan teknologi dan internet. Selain keterbatasan geografis dan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung di wilayah tersebut juga belum dikembangkan secara merata. Apalagi jika melihat Pilkada Serentak 2020, terlihat ratusan TPS di Indonesia Timur tidak dapat menggunakan aplikasi SIREKAP karena keterbatasan jaringan internet. Wajar saja jika hal ini kembali terjadi pada Pemilu 2024. Aplikasi SIREKAP pada hakikatnya bukanlah sebagai dasar penghitungan dan penentuan pemenang, melainkan hanya sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi.⁷⁸

3) Taktik Kampanye Paslon Pilpres 2024 di Tiktok.

Pada Pemilu Presiden 2024, platform media sosial TikTok menjadi salah satu arena kampanye digital yang signifikan bagi para pasangan calon (paslon). Penggunaan TikTok sebagai sarana kampanye mencerminkan pergeseran strategi untuk menjangkau pemilih muda yang merupakan pengguna utama platform ini. TikTok menjadi arena Paslon Pilpres 2024 untuk berburu simpati generasi muda. Berdasarkan data penggunaan TikTok pada kampanye Pilpres 2024 sebagai berikut; Total pengguna aktif TikTok di Indonesia mencapai 125 juta pada 2024, 63% pengguna TikTok di Indonesia berusia 18-34 tahun, Hashtag terkait Pilpres 2024 di TikTok mencapai total 10 miliar views,⁷⁹ Rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna TikTok Indonesia untuk konten politik adalah 45 menit per hari selama masa kampanye, dan 70% pemilih muda menyatakan TikTok mempengaruhi pilihan politik mereka.⁸⁰ Karena jumlahnya

⁷⁸ Andriansyah, A. P., Herawati, A., Nabila, B., Ilham, M. R., Fathurrohman, M. W., Mulya, R., & Suryakencana, U. (2024). Perlindungan Hak Informasi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2024 Dikaitkan Dengan Problematika ' Sirekap ' Sebagai Sarana Informasi Alternatif. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 320–333.

⁷⁹ TikTok Newsroom. (2024). TikTok's Role in Indonesian Presidential Election 2024.

⁸⁰ Lembaga Survei Indonesia. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Preferensi Politik Generasi Z dan Milenial.

yang banyak dan dapat dilihat oleh banyak orang, TikTok menjadi media kampanye yang sangat efektif. Faktor lain yang membuat TikTok begitu efektif untuk digunakan adalah platform ini dikenal memiliki konten yang kreatif, jenaka, dan berwawasan. Politisi dapat menggunakan ini untuk menyampaikan pesan mereka secara ringkas namun efektif. Video yang menarik, jelas, atau inspiratif dapat membantu kandidat menonjol dari kerumunan dan memengaruhi opini publik, Faktor lainnya adalah viralitas konten..⁸¹

TikTok terkenal dengan pembuatan konten viral yang sangat cepat. Popularitas dan visibilitas kandidat politik dapat meroket jika video dari kampanye mereka menjadi viral dan menghasilkan percakapan di situs tersebut. Selanjutnya, kandidat dapat menyesuaikan pesan untuk kelompok tertentu berdasarkan demografi, minat, dan perilaku dengan menggunakan fungsi segmentasi audiens TikTok. Hal ini memungkinkan kampanye politik untuk memengaruhi dan menjangkau calon pemilih dengan lebih berhasil. Masifnya dampak TikTok Era kontemporer adalah era influencer, atau orang yang dapat memengaruhi orang lain, seperti yang terlihat dalam kampanye politik. Karena politik benar-benar "seni memengaruhi orang," hal ini sebenarnya tidak dapat dihindari.". Politisi dapat mengekspresikan pandangan mereka di TikTok menggunakan berbagai cara, seperti menyoroti pencapaian mereka, masing-masing Paslon Pilpres atau framing negatif terhadap lawan politiknya. Vowe & Henn (2015) ada beberapa profesional yang membahas hal ini. Selain itu, TikTok dapat dilihat dari sudut pandang demokrasi digital dalam kaitannya dengan efek influencer. Teori ini menekankan bagaimana kelompok sosial dan influencer

⁸¹ Alizen, A. N., Raisuddin, Gendiswardani, R. D. A., Nihru, S. S. H., & Akbar, R. A. M. (2023). *Prospek Penggunaan Tiktok Sebagai Instrumen Politik Pada Pemilihan Umum 2024*. LABORATORIUM INDONESIA 2045.

membentuk opini dan perilaku publik. Kandidat dapat memanfaatkan TikTok sebagai senjata kampanye politik dengan berkolaborasi dengan pengguna atau influencer di platform tersebut untuk menyebarkan pesan mereka dan memengaruhi pemilih.

Politik identitas, permasalahan Sirekap, dan taktik kampanye di TikTok merupakan fenomena yang saling terkait dalam dinamika Pemilu Presiden 2024 di Indonesia. Ketiga hal ini mencerminkan tantangan sekaligus peluang dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan kanal komunikasi digital untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena-fenomena ini menunjukkan pentingnya optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital bagi generasi muda dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan kanal-kanal komunikasi digital yang membuka peluang baru bagi partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses demokrasi. Pemanfaatan media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform daring lainnya telah mengubah lanskap komunikasi politik dan menawarkan ruang-ruang baru bagi diskursus publik. Generasi muda memiliki dunianya sendiri termasuk dalam melihat dunia politik. Cara pandang ini yang menyebabkan munculnya kesenjangan antara generasi tua dan generasi muda dalam melihat politik sebagai implementasi kehidupan berdemokrasi. Generasi muda dalam menyampaikan aspirasi politik dapat belajar dari dunia pendidikan di BEM, Senat Mahasiswa dan lain-lain serta kanal komunikasi digital. Kanal komunikasi seperti media sosial dan platform online menjadi wadah pertarungan antara "das solen" dan "das sein", antara idealisme dan pragmatisme dalam konsolidasi demokrasi. Di satu sisi, kita memiliki gambaran ideal tentang bagaimana demokrasi seharusnya berfungsi, partisipasi publik yang setara, debat yang rasional, dan pemerintahan yang responsif. Ini adalah "das solen", cita-cita yang menjadi panduan.⁸² Namun, realitas politik, atau "das sein", seringkali jauh dari idealisme (das solen) ini.⁸³

Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang aktif, kritis, dan terlibat dalam kenyataan kehidupan publik secara bermakna. Itu termasuk penggunaan kanal digital dalam upaya mendorong partisipasi politik yang substantif. Realitanya seringkali berbeda, banyak generasi muda terjebak dalam budaya "clicktivism" dan "like & dislike". Budaya ini diikuti sikap sekedar menyukai, membagikan, atau berkomentar tanpa

⁸² Konsep "das sollen" dan "das sein" berasal dari filsafat Jerman, yang sering digunakan dalam konteks teori hukum dan politik. Lihat: Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.

⁸³ Loader, B. D., & Mercea, D. (2011). *Networking Democracy? Social media innovations and participatory politics*. *Information, Communication & Society*, 14(6), 757-769.

pemahaman mendalam atau memberikan dasar tindakan dalam memberi keputusan “like or dislike”.⁸⁴ Sikap atau budaya ini menjadi hambatan dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi yang partisipatif. Dalam konteks ini, di era digital muncul figur-figur yang memengaruhi influencer politik yang pengaruh besar terhadap opini publik. Figur-figur tersebut dapat menjadi patron yang mengarahkan pandangan dan pilihan politik generasi muda. Namun, generasi muda juga memiliki potensi untuk menciptakan idola (patron) dari kalangannya sendiri. Dengan memahami dinamika antara idealisme dan pragmatisme, peran patron dan penciptaan idola, serta faktor pendukung dan penghambat, generasi muda diharapkan dapat menjadi kekuatan pendorong dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan upaya mengoptimalkan peran media dalam penyebaran informasi pemberitaan pemilu, diekspektasikan generasi muda berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Sebagai contoh, pemahaman terkait hak dan kewajiban di setiap tahapannya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas politikus dalam proses pemilu, serta menghindari kecurangan-kecurangan yang dapat mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Sehingga peningkatan kualitas pemilu dan konsolidasi demokrasi pun akan terwujud. Namun, di balik potensi besar yang ditawarkan, terdapat pula tantangan dan hambatan dalam pemanfaatan kanal komunikasi digital ini secara optimal untuk mendukung konsolidasi demokrasi.

Taskap ini akan membahas tiga aspek dari pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dalam konteks konsolidasi demokrasi, dengan menggunakan analisa berdasarkan Teori Konsolidasi Demokrasi, Teori Komunikasi Politik Digital, Teori Demokrasi Digital, dan perkembangan lingkungan strategis. Diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang peran kanal komunikasi digital dalam membentuk partisipasi politik generasi muda dan pengaruhnya terhadap proses konsolidasi demokrasi di era digital.

⁸⁴ Nasrullah, R. (2023). *Clicktivism dan Partisipasi Politik Digital Generasi Muda di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 15(2), 121-135.

13. **Faktor Pendukung dan Penghambat Pemanfaatan Kanal Komunikasi Digital.**

Sudah menjadi kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda menggunakan kanal komunikasi digital. Partisipasi aktif generasi muda dalam kanal komunikasi digital, seperti media sosial, forum online, dan platform berbagi konten, memiliki potensi besar untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Namun, terdapat sejumlah faktor yang mendukung sekaligus menghambat pemanfaatan kanal komunikasi digital ini. **Menurut Teori Konsolidasi Demokrasi yang digagas oleh Juan J. Linz dan Alfred Stepan**, ditekankan pentingnya membangun institusi demokrasi yang kuat, budaya politik yang demokratis, dan keterlibatan masyarakat yang menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam konteks pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda, teori ini memberikan kerangka untuk memahami bahwa teknologi dapat mendukung atau menghambat konsolidasi demokrasi. Pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda memiliki potensi besar untuk mendukung konsolidasi demokrasi. Namun, perlu adanya upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat seperti kesenjangan digital, Disinformasi, Misinformasi, Malinformasi dan Polarisasi politik digital. Dalam hal ini Pemerintah, masyarakat sipil, dan platform digital perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, inklusif, dan mendukung partisipasi politik yang bermakna bagi semua generasi.

Teori Komunikasi Politik Digital yang dikembangkan oleh Andrew Chadwick dan Philip N. Howard, memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bahwa pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dapat mewujudkan konsolidasi demokrasi. Teori ini menekankan peran sentral teknologi digital dalam membentuk lanskap politik kontemporer, termasuk bagaimana informasi politik diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh publik. Meskipun teknologi digital memiliki potensi besar untuk memperkuat partisipasi politik, transparansi, dan akuntabilitas, terdapat juga risiko penyebaran disinformasi, polarisasi, dan manipulasi informasi yang perlu diatasi. Oleh karena itu untuk memaksimalkan potensi positif dan mengurangi risiko negatif, perlu adanya

upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, platform digital, dan generasi muda itu sendiri. Edukasi literasi digital, regulasi yang tepat, dan pengembangan platform yang lebih transparan dan akuntabel merupakan beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan melemahkannya

Sementara itu **Teori Demokrasi Digital yang dikemukakan oleh Lincoln Dahlberg dan Zizi Papacharissi**, menekankan potensi teknologi digital dalam memperluas partisipasi warga negara dalam proses demokrasi.⁸⁵ Internet dan media digital dapat menciptakan ruang publik virtual yang memungkinkan terjadinya diskusi politik yang lebih inklusif dan deliberatif. Dalam konteks pemanfaatan komunikasi digital oleh generasi muda untuk konsolidasi demokrasi, teori ini memberikan kerangka analisis yang relevan yakni memberikan kerangka pemahaman bahwa komunikasi digital dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkuat demokrasi. Untuk memaksimalkan potensi komunikasi digital dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, perlu adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan digital, memerangi disinformasi, Misinformasi, Malinformasi, Hoaks dan Polarisasi Politik di ruang digital. Yang juga tidak bisa diabaikan adalah teori ini juga menuntut literasi digital dan partisipasi aktif generasi muda dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kebaikan bersama.

Perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional memiliki dampak signifikan terhadap pemanfaatan komunikasi digital oleh generasi muda dalam upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi. Pada **Tingkat Lingkungan Strategis Global: Peluang:** Meningkatnya konektivitas global dan arus informasi lintas batas membuka peluang bagi generasi muda untuk belajar dari praktik demokrasi di negara lain, mengakses informasi yang beragam, dan membangun jaringan solidaritas internasional. **Tantangan:** Disinformasi yang disponsori negara, kampanye pengaruh asing, dan ancaman keamanan siber dapat merusak kepercayaan

⁸⁵ Dahlberg, L. (2001). The Internet and Democratic Discourse: Exploring the prospects of online deliberative forums extending the public sphere. *Information, Communication & Society*, 4(4), 615-633.

publik terhadap informasi, memicu polarisasi, dan menghambat partisipasi politik yang konstruktif.

Pada Tingkat Lingkungan Strategis Regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, terdapat peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone. Hal ini membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam isu-isu regional; **Peluang:** Kerjasama regional dalam bidang teknologi dan informasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan literasi digital generasi muda, serta mendorong inisiatif bersama untuk memerangi disinformasi dan ujaran kebencian. **Tantangan:** Ketegangan geopolitik dan persaingan antarnegara di kawasan dapat memicu penyebaran propaganda, manipulasi informasi, dan bahkan serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat konsolidasi demokrasi. Sedangkan pada tingkat **Lingkungan Strategis Nasional. Peluang.** Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan infrastruktur digital, literasi digital, dan kebebasan berekspresi online dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik generasi muda. **Tantangan.** Regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi, pengawasan online yang berlebihan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat menghambat partisipasi politik, merusak kepercayaan publik, dan menghambat konsolidasi demokrasi.

Untuk pemanfaatan kanal komunikasi digital secara optimal terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat. Dalam konteks ini, mengetahui faktor pendukung dan penghambat akan menjadi dasar strategis dalam mengoptimalkan kanal komunikasi digital terkait dengan upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi.

a. Faktor Pendukung.

Pertama, **Aksesibilitas teknologi.** Penetrasi internet di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2023-2024. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2024, persentase penduduk Indonesia yang terhubung dengan internet mencapai 78,19%, meningkat dari 77,02% pada tahun

sebelumnya, dengan mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia 18-34 tahun.⁸⁶ Teknologi yang digunakan dalam komunikasi digital memiliki peranan penting dalam meningkatkan keterlibatan Generasi muda dalam demokrasi. Aplikasi seluler, media sosial, dan platform digital lainnya, memungkinkan Generasi muda berbagi pengetahuan dengan mengakses informasi, memperoleh inspirasi, berinteraksi dengan komunitas, dan terlibat dalam kegiatan demokrasi secara online.

Berdasarkan survei terbaru, platform media sosial menjadi kanal komunikasi digital yang paling populer di kalangan generasi muda Indonesia, sebagai berikut ; **Media Sosial:** Instagram: 91% pengguna aktif, TikTok: 84% pengguna aktif, Facebook: 79% pengguna aktif, Twitter: 52% pengguna aktif. **Aplikasi Pesan Instan:** WhatsApp: 97% pengguna aktif, Line: 58% pengguna aktif, Telegram: 47% pengguna aktif, **Platform Berbagi Video:** YouTube: 94% pengguna aktif, **Forum Online:** Reddit: 15% pengguna aktif, dan Kaskus: 12% pengguna aktif.⁸⁷ Meningkatnya aksesibilitas teknologi memiliki implikasi signifikan terhadap partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi. Kanal komunikasi digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform berbagi konten menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengakses informasi, menyuarakan pendapat, dan terlibat dalam diskusi publik. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya ruang publik untuk pertukaran ide dan pembentukan opini publik.

Kedua, **Literasi digital.** Literasi digital merupakan faktor kunci yang mendukung pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dalam konteks konsolidasi demokrasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, tingkat penetrasi internet di

⁸⁶ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023-2024," (Jakarta: APJII, 2024).

⁸⁷ We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: Indonesia.

Indonesia mencapai 77,02% dari total populasi. Dari jumlah tersebut, 91% penggunaannya adalah generasi muda berusia 16-64 tahun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa generasi muda merupakan pengguna utama kanal komunikasi digital di Indonesia.⁸⁸ Peningkatan literasi digital ini berkorelasi positif dengan partisipasi generasi muda dalam isu-isu demokrasi melalui kanal digital. Sebuah studi yang dilakukan oleh *Center for Digital Society* Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 78% generasi muda di Indonesia menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk mencari informasi politik dan terlibat dalam diskusi tentang isu-isu demokrasi.⁸⁹

Namun, tingginya angka pengguna internet tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat literasi digital. Hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks literasi digital nasional Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab.⁹⁰ Generasi muda, sebagai kelompok demografis terbesar di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas.

Ketiga, **Kebebasan berekspresi diranah digital**. Menurut laporan tahunan organisasi pemantau kebebasan pers, *Reporters Without Borders (RSF)*, pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat 113 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia. Peringkat ini menunjukkan adanya tantangan signifikan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk di ranah digital. Kebebasan berekspresi diranah digital menjadi faktor krusial dalam pemanfaatan

⁸⁸ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan Survei Internet APJII 2022-2023. Jakarta: APJII.

⁸⁹ Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. (2024). Peran Media Digital dalam Partisipasi Politik Generasi Muda Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.

⁹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Laporan Indeks Literasi Digital Nasional 2023.

kanal komunikasi digital oleh generasi muda untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi. Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif beberapa teori kunci dalam studi demokrasi dan komunikasi politik. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur konten online. Namun, beberapa pasal dalam UU ITE dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi karena multitafsir dan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau tokoh publik. Kebebasan berekspresi online menjadi fondasi bagi terwujudnya model demokrasi digital yang deliberatif, dimana generasi muda dapat terlibat dalam pertukaran ide dan argumen secara bebas dan setara.

Generasi muda, terutama Generasi Z (lahir 1997-2012) dan Milenial (lahir 1981-1996), merupakan pengguna utama kanal komunikasi digital. Survei global tahun 2023 menunjukkan pola penggunaan yang beragam⁹¹, sebagai berikut: **Politik**; 73% generasi muda Indonesia lebih mempercayai informasi politik dari influencer media sosial dibandingkan media mainstream pada 2024,⁹² 62% generasi muda Indonesia terlibat dalam diskusi politik digital setidaknya sekali seminggu pada 2024, meningkat dari 54% pada 2023.⁹³ **Entertainment / Hiburan**: 1) 92% generasi muda mengakses platform streaming video seperti YouTube dan Netflix setidaknya sekali sehari. 2) 78% menggunakan aplikasi musik streaming seperti Spotify atau Apple Music. 3) 65% bermain game online secara rutin. **Pengetahuan**: 1) 85% menggunakan internet untuk penelitian akademik atau pengembangan keterampilan. 2) 72% mengikuti kursus online atau webinar edukatif setidaknya sebulan sekali. **Toleransi**: 1) 76% mengikuti akun media sosial yang mempromosikan keberagaman dan inklusi. 2) 62% berpartisipasi dalam kampanye digital untuk isu-isu sosial. **Ekonomi**: 1) 88%

⁹¹ Deloitte Global. (2023). Digital Media Trends, 17th edition

⁹² Reuters Institute. (2024). Digital News Report 2024.

⁹³ Lembaga Survei Indonesia. (2024). Perilaku Politik Digital Generasi Muda Indonesia.

menggunakan aplikasi perbankan digital. 2) 75% melakukan pembelian online setidaknya sekali sebulan. 3) 42% mengikuti konten finansial di media sosial. **Motivasional:** 1) 82% mengikuti influencer atau akun motivasi di media sosial. 2) 58% menggunakan aplikasi pengembangan diri atau meditasi. **Sosial Budaya:** 1) 90% menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga. 2) 70% mengikuti akun yang membagikan konten budaya lokal atau global. **Lainnya:** 1) 95% menggunakan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram. 2) 60% menggunakan aplikasi kencan online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2023), dalam laporan Penggunaan TIK dan Implikasinya terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat, bahwa di Indonesia dalam tren serupa terlihat beberapa perbedaan sebagai berikut; 1) 94% generasi muda Indonesia mengakses internet melalui smartphone. 2) Media sosial paling populer adalah Instagram (85%), TikTok (82%), dan Twitter/X (75%). 3) 78% menggunakan internet untuk mencari informasi terkait pendidikan, dan 4) 65% aktif dalam diskusi sosial-politik digital⁹⁴. Pola penggunaan media sosial menunjukkan bahwa kanal komunikasi digital menjadi integral dalam kehidupan generasi muda, mencakup berbagai aspek dari hiburan hingga partisipasi politik dan pengembangan diri.

Keempat. **Antusias partisipasi politik Generasi muda.** Generasi muda memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial generasi muda, termasuk dalam hal pandangan politik. Di media sosial, generasi muda sering kali terpapar pada opini dan sikap politik teman sebaya, influencer, atau figur publik yang dikagumi. Hal ini dapat menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan pandangan yang dominan di lingkungan sosial generasi muda, bahkan jika pandangan tersebut bertentangan

⁹⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Laporan Penggunaan TIK dan Implikasinya terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat.

dengan keyakinan pribadi generasi muda.⁹⁵ Survei Internet APJII 2023-2024 mengungkapkan bahwa media sosial menjadi platform utama bagi generasi muda Indonesia untuk berinteraksi, mengakses informasi, dan mengekspresikan pandangan politik mereka. Data menunjukkan bahwa 98,5% pengguna internet berusia 13-34 tahun aktif menggunakan media sosial⁹⁶. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Instagram menjadi kanal yang relatif sesuai untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan kelompok pemilih pemula. Bagi generasi muda, Pemilu 2024 menjadi pengalaman perdana dalam menyampaikan suara melalui mekanisme pemilihan umum.

Generasi muda menjadi ajang mendulang suara yang cukup besar karena jumlah generasi muda dalam daftar pemilih tetap (DPT) menurut perhitungan KPU mencapai 22,85 persen atau sekitar 46,8 juta jiwa.⁹⁷ Dengan demikian kanal media Instagram bisa menjadi ujung tombak sebagai platform sosialisasi seputar pemilu bagi generasi muda. Terutama untuk mengedukasi dan meningkatkan kepedulian serta partisipasi ketika pemungutan suara nantinya. Selain Instagram, medium medsos lain yang dapat digunakan adalah Facebook. Walaupun hanya separuh dari proporsi pengguna Instagram, yakni sekitar 79%, tetapi platform ini bisa dilirik juga sebagai kanal alternatif untuk mendekati generasi muda.⁹⁸

Generasi selanjutnya yang menjadi obyek untuk meraih suara dalam kontestasi politik adalah kelompok generasi milenial. Generasi ini memiliki rentang usia yang cukup lebar, yakni dari 25-44 tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Pew Research Center*,

⁹⁵ Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2023). *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge University Press.

⁹⁶ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023-2024," (Jakarta: APJII, 2024).

⁹⁷ Krisdamarjati, Y. A. (2023). *Tiga Kriteria Penting Komunikasi Politik Melalui Media Sosial*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/07/tiga-kriteria-penting-komunikasi-politik-melalui-media-sosial>

⁹⁸ Arlinta, P. (2024). *Pemilu Indonesia dalam angka, Pesta Demokrasi Satu Hari Terbesar di Dunia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/14/pemilu-dalam-angka-pesta-demokrasi-satu-hari-terbesar-di-dunia>

generasi milenial dapat dikelompokkan menjadi dua sub-generasi: Milenial muda dan Milenial tua.⁹⁹ Milenial muda, yang saat ini berusia sekitar 25-34 tahun, cenderung lebih mahir dalam teknologi digital dan lebih terbuka terhadap perubahan sosial. Sementara itu, Milenial Tua, dengan rentang usia 35-44 tahun, memiliki pengalaman hidup yang lebih dekat dengan generasi X dan cenderung lebih mapan dalam karir serta kehidupan pribadi.¹⁰⁰

Pemahaman tentang perbedaan karakteristik antara Milenial Muda dan Milenial Tua ini sangat penting dalam strategi politik. Para kontestan politik perlu merancang pendekatan yang berbeda untuk masing-masing kelompok, mengingat perbedaan prioritas dan pandangan hidup Generasi Muda. Misalnya, isu-isu seperti lapangan kerja dan aksesibilitas perumahan mungkin lebih relevan bagi Milenial Muda, sementara Milenial Tua mungkin lebih tertarik pada kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan anak dan stabilitas ekonomi jangka panjang.¹⁰¹ Dihitung berdasarkan populasi, pada Pemilu 2024 nanti, generasi Milenial potensial menyumbang suara hingga 68,8 juta pemilih atau mengakuisisi sebesar 33,6 persen dari total DPT nasional.

Angka ini merupakan populasi suara terbesar dari berbagai generasi yang akan memilih nanti. Potensi suara dari generasi Milenial itu cukup jauh meninggalkan peluang suara dari generasi Z yang sekitar 23%, generasi X 28,07%, Generasi Baby Boomers 13,73 persen, dan generasi sebelumnya yang hanya 1,74 persen.¹⁰² Oleh karena itu, generasi muda tentu saja akan menjadi sasaran utama para tokoh politik untuk meraih dukungan. Pasalnya, diakumulasi suara antara generasi Z dan generasi Y terhadap seluruh DPT mencapai 56,45%. Data menunjukkan bahwa 61% generasi muda menganggap Pemilu 2024 penting, Angka ini

⁹⁹ Dimock, M. (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Pew Research Center.

¹⁰⁰ Fry, R. (2018). Millennials projected to overtake Baby Boomers as America's largest generation. Pew Research Center.

¹⁰¹ Deloitte. (2020). The Deloitte Global Millennial Survey 2020.

¹⁰² Ibid.

menggambarkan tingginya kesadaran politik di kalangan pemilih muda, yang dapat menjadi indikator positif bagi partisipasi demokrasi di masa depan.¹⁰³ Sementara itu 21% menganggap netral terhadap pemilu 2024.¹⁰⁴ Kelompok ini mungkin belum memutuskan seberapa signifikan pemilu bagi generasi muda, atau merasa bahwa dampak pemilu terhadap kehidupan generasi muda masih belum jelas. Sikap netral sebagian masyarakat menunjukkan adanya keraguan atau mungkin kelelahan dalam menghadapi informasi politik yang membanjiri ruang digital.

Di sisi lain, 18% generasi muda menganggap pemilu 2024 tidak penting.¹⁰⁵ Meskipun ini merupakan kelompok minoritas, angka tersebut tetap signifikan dan dapat mencerminkan adanya kekecewaan atau skeptisisme terhadap proses politik di kalangan sebagian pemilih muda. Beberapa pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas generasi muda menganggap pemilu penting, masih ada tantangan dalam meyakinkan seluruh spektrum pemilih muda tentang signifikansi proses demokrasi ini. Penting bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan kandidat untuk memahami dan merespon beragam pandangan ini guna meningkatkan partisipasi dan kepercayaan terhadap proses demokratis.

Pengaruh patron dalam partisipasi politik generasi muda merupakan hal yang kompleks dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer. Meskipun generasi muda sering dianggap lebih independen dalam pengambilan keputusan politik, bahwa pengaruh patron tetap memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku politik mereka.¹⁰⁶ Patron, dalam hal ini, dapat merujuk pada berbagai figur otoritas seperti orang tua, tokoh masyarakat, pemuka agama, atau bahkan influencer media sosial. Pengaruh patron terhadap

¹⁰³ Alvares Research Center. (2023). Survei Nasional: Pandangan Generasi Muda terhadap Pemilu 2024.

¹⁰⁴ Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021). Voters and Voting Behavior in Indonesia: Change and Continuity.

¹⁰⁵ Lembaga Survei Indonesia. (2023). Laporan Survei: Persepsi Pemilih Muda terhadap Pemilu 2024.

¹⁰⁶ Aspinal, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.

partisipasi politik generasi muda bervariasi dan tergantung pada beberapa faktor, sebagai berikut: 1) Latar belakang sosial-budaya, di daerah dengan ikatan komunal yang kuat, pengaruh patron tradisional seperti tokoh adat atau pemuka agama masih cukup signifikan dalam membentuk preferensi politik anak muda. 2) Tingkat pendidikan dan akses informasi, generasi muda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dan akses informasi yang lebih luas cenderung kurang terpengaruh oleh patron tradisional, namun mungkin lebih dipengaruhi oleh "patron modern" seperti akademisi atau figur publik yang mereka hormati. 3) Media sosial, Platform digital telah menciptakan bentuk patronase baru, di mana influencer dan selebriti online dapat memengaruhi pandangan politik generasi muda.¹⁰⁷

Namun, penting untuk dipahami bahwa pengaruh patron tidak selalu bersifat deterministik, banyak anak muda yang mampu memadukan pengaruh patron dengan penilaian pribadi mereka sendiri. Generasi muda mungkin menghormati pandangan patron mereka, tetapi tetap melakukan evaluasi kritis terhadap informasi yang diterima. Pengaruh patron terhadap partisipasi politik generasi muda tidak selalu berdampak negatif, dalam beberapa kasus, patron dapat berperan sebagai katalis yang mendorong partisipasi politik yang lebih aktif di kalangan anak muda, terutama jika patron tersebut mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan sipil.

b. Faktor Penghambat

Di era digital, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak konsolidasi demokrasi. Namun, pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda juga menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah kesenjangan digital, baik dalam hal akses maupun kemampuan

¹⁰⁷ Wicaksono, A. S. (2022). Politik Populer di Era Digital: Studi tentang Pengaruh Influencer dan Selebriti Online terhadap Preferensi Politik Generasi Muda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 121-135.

memanfaatkan teknologi. Bahwa tidak semua generasi muda memiliki akses internet yang memadai atau literasi digital yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam ruang online. Selain itu, Disinformasi, Malinformasi, misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian dapat mengaburkan kebenaran dan memecah belah masyarakat. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah terjadinya Polarisasi politik digital, Pemanfaatan kanal komunikasi digital menjadi semakin penting dalam era digital saat ini. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan kanal komunikasi digital.

Beberapa faktor tersebut antara lain: **Pertama, Kesenjangan digital.** Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital yang signifikan, yang menghambat potensi generasi muda dalam memanfaatkan kanal komunikasi digital untuk memperkuat demokrasi. Kesenjangan ini mencakup akses terbatas terhadap internet, infrastruktur yang belum memadai, serta tingkat literasi digital yang rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, hanya 54,68% penduduk di daerah 3T yang memiliki akses internet, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 78%.¹⁰⁸ Infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T masih terbatas, banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan 4G atau bahkan 3G.² Hal ini menghambat kecepatan dan kualitas akses internet, sehingga menyulitkan pemanfaatan kanal komunikasi digital secara optimal.

Tingkat literasi digital di daerah 3T juga masih rendah. Banyak penduduk, termasuk generasi muda, belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Rendahnya literasi digital membuat generasi muda di daerah 3T rentan terhadap disinformasi dan propaganda online. Kesenjangan digital merupakan salah satu tantangan signifikan dalam upaya mengoptimalkan penguatan kanal komunikasi digital

¹⁰⁸ Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023.

bagi generasi muda untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi. Kondisi ini ini menciptakan ketimpangan akses dan kemampuan warga negara dalam berpartisipasi pada ruang publik digital, yang berpotensi mengancam prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Fenomena ini merujuk pada ketidaksetaraan akses, penggunaan, dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di antara berbagai kelompok masyarakat.

Di Indonesia, meskipun penetrasi internet telah mencapai 77,02% pada tahun 2023, kesenjangan digital masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.¹⁰⁹ Bahwa tidak semua generasi muda memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital dan internet. Meskipun penetrasi internet di Indonesia meningkat, masih ada kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Bahwa akses internet di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan, yang menghambat generasi muda di daerah terpencil untuk berpartisipasi dalam aktivitas digital secara efektif.¹¹⁰ Kesenjangan digital mengakibatkan partisipasi politik yang tidak merata di kalangan generasi muda. Bagi generasi muda yang memiliki akses dan keterampilan digital yang memadai cenderung lebih aktif dalam diskusi politik, kampanye digital, dan aktivitas demokrasi lainnya. Sebaliknya, generasi muda yang tertinggal dalam hal akses dan literasi digital akan terpinggirkan dari proses demokrasi.

Generasi Muda mungkin tidak mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang politik dan kebijakan publik, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Kesenjangan digital dapat memicu polarisasi sosial. Generasi muda yang aktif di media sosial dan platform digital mungkin cenderung berkumpul dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, sementara yang tidak memiliki akses digital tetap di luar

¹⁰⁹ Samuel Abrijani Pangerapan, "Strategi Nasional Kesenjangan Digital," *Jurnal Kebijakan Komunikasi*, vol. 10, no. 2, 2023, hlm. 156-178.

¹¹⁰ Barber, B. R. (2001). The uncertainty of digital politics. *Harvard International Review*, 23(1), 42.

lingkaran diskusi tersebut. Hal ini dapat memperdalam perpecahan sosial dan politik di masyarakat.¹¹¹ Menyikapi kondisi ini maka Pemerintah perlu memperluas akses internet ke seluruh pelosok negeri dengan membangun infrastruktur teknologi yang memadai. Program subsidi perangkat digital untuk keluarga kurang mampu juga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses.

Kedua, Disinformasi, misinformasi, malinformasi dan hoaks. Dalam era digital yang ditandai dengan arus informasi yang masif dan cepat. Fenomena disinformasi, misinformasi, malinformasi, dan hoaks telah menjadi tantangan serius dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi digital, khususnya bagi generasi muda dalam konteks konsolidasi demokrasi. Perbedaan antara istilah-istilah ini perlu dipahami untuk mengembangkan strategi penanganan yang efektif. 1) Disinformasi merujuk pada Informasi yang salah atau menyesatkan yang sengaja disebar dengan tujuan untuk menipu atau memanipulasi publik, informasi keliru yang sengaja disebarluaskan dengan niat untuk menyesatkan atau memanipulasi orang banyak.¹¹² Penyebar disinformasi biasanya memiliki motif tertentu, seperti memengaruhi persepsi seseorang, menciptakan kepanikan atau kecemasan, dan membentuk ketidakpercayaan pada organisasi tertentu. Platform digital menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk partisipasi politik dan akses informasi. Namun di sisi lain, prevalensi disinformasi di ruang digital menghadirkan tantangan serius bagi kualitas diskursus demokratis.

Generasi muda, sebagai pengguna aktif media digital, sering kali menjadi target utama sekaligus penyebar tidak sengaja dari disinformasi politik. Kemudahan berbagi informasi melalui platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok telah menciptakan lingkungan di mana berita palsu dan narasi manipulatif dapat menyebar dengan cepat. Dalam konteks pemilihan umum, misalnya,

¹¹¹ Chadwick, A., & Howard, P. N. (2009). *Routledge handbook of Internet politics*. Routledge London.

¹¹² Wahyuni, I. R. (2019). Disinformasi di Media Sosial: Studi Kasus Penyebaran Berita Palsu tentang Vaksinasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 121-135.

kampanye hitam berbasis disinformasi dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif dan mendistorsi kompetisi politik yang sehat. Hal ini mencakup penguatan literasi digital, regulasi yang seimbang terhadap platform media sosial, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor teknologi. Yang tidak kalah penting, pengembangan pemikiran kritis dan etika digital di kalangan generasi muda harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan.

2) Misinformasi adalah informasi yang tidak akurat namun disebarakan tanpa niat jahat/tanpa sengaja.¹¹³ Misinformasi dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain kecerobohan pengirim, salah pengetikan atau pengutipan sumber, serta ketidaktahuan atau keterbatasan pemahaman pengirim. Walaupun tidak dilatarbelakangi oleh niat jahat, misinformasi tetap saja dapat menyebabkan salah paham.¹¹⁴ Bersamaan dengan peluang yang ditawarkan, muncul tantangan serius berupa misinformasi yang dapat mengancam proses konsolidasi demokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan multidimensi, sebagai berikut; a) Peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda menjadi krusial. Program pendidikan yang berfokus pada kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi perlu diperkuat dan diperluas jangkauannya. b) Langkah-langkah proaktif dalam mendeteksi dan membatasi penyebaran misinformasi. Ini termasuk pengembangan algoritma yang lebih canggih untuk mendeteksi konten menyesatkan dan meningkatkan transparansi terkait sumber informasi. c) Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memerangi misinformasi perlu ditingkatkan. Inisiatif seperti *fact-checking* kolaboratif dan kampanye kesadaran publik dapat membantu membangun resistensi masyarakat terhadap misinformasi. d) Mengatasi misinformasi tidak mengorbankan kebebasan berekspresi yang merupakan pilar

¹¹³ Astuti, D. P. (2020). Misinformasi dan Disinformasi di Era Digital: Tantangan bagi Jurnalisme dan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 24(1), 45-58.

¹¹⁴ Tandoc Jr, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "fake news": A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137-153.

demokrasi. Keseimbangan antara perlindungan terhadap misinformasi dan penjagaan ruang demokrasi digital perlu dijaga dengan hati-hati.

3) Malinformasi, informasi yang benar tetapi disebarakan dengan tujuan untuk menyakiti, menyesatkan, atau menyerang orang lain.¹¹⁵ Dalam konteks penggunaan kanal komunikasi digital, malinformasi dapat menjadi ancaman serius bagi konsolidasi demokrasi. Berbeda dengan misinformasi yang mungkin disebarakan tanpa niat jahat, malinformasi memiliki tujuan eksplisit untuk memanipulasi opini publik, memecah belah masyarakat, atau merusak proses demokratis. Penyebaran malinformasi bisa memicu ketidakpercayaan, polarisasi, dan konflik sosial yang merusak proses demokrasi. Dalam konteks politik, malinformasi dapat mengambil berbagai bentuk, seperti kampanye hitam terorganisir, manipulasi media yang canggih (*deepfakes*), atau operasi pengaruh asing.¹¹⁶

Dampak malinformasi terhadap konsolidasi demokrasi sangat signifikan, dapat merusak kepercayaan terhadap institusi demokratis, memperparah polarisasi sosial-politik, dan bahkan mempengaruhi hasil pemilihan. Malinformasi dapat menciptakan lingkungan informasi yang toxic, di mana kebenaran menjadi relatif dan diskursus publik yang sehat menjadi sulit dicapai, seperti; Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pemerintah, misalnya, informasi yang benar tentang kesalahan administratif dalam pemilu, jika disebarakan dengan tujuan meragukan integritas KPU, hal ini bisa merusak kepercayaan publik. Penggunaan informasi yang benar untuk menyalahkan atau menyerang kelompok tertentu dapat memperdalam polarisasi sosial politik, sehingga polarisasi ini dapat menghambat dialog konstruktif dan memperoleh kohesi sosial yang penting untuk demokrasi yang sehat.

¹¹⁵ Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, tentang istilah hoaks dalam dunia digital seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

¹¹⁶ Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). Analisis Ancaman Siber dan Operasi Pengaruh Digital terhadap Pemilu 2024. Jakarta: BSSN

4) Hoaks adalah berita bohong yang sengaja dibuat untuk menipu atau mengecoh pembaca.¹¹⁷ Kanal komunikasi digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan telah menjadi alat utama bagi generasi muda untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, bersamaan dengan kemudahan ini, muncul pula tantangan serius berupa penyebaran hoaks (berita palsu) yang dapat merusak kualitas informasi dan mengganggu proses demokrasi. Generasi muda sangat aktif di media sosial, platform seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Tiktok digunakan secara luas untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial juga menjadi sarang penyebaran hoaks, hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa informasi palsu cenderung menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada informasi yang akurat/benar.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada awal 2024, konten politik telah teridentifikasi sebagai kategori yang paling rawan terhadap penyebaran hoaks atau informasi palsu. Hasil Survei ini menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia di era digital, terutama menjelang dan selama periode pemilihan umum. Mayoritas atau 24,7% responden sering menemukan hoaks dalam konten politik, paling banyak dibanding kategori lainnya. Kemudian 15,27% sering menemukan hoaks dalam konten terkait infotainment alias gosip, 11,49% kejahatan, 10,53% ekonomi atau keuangan, dan 10,38% dalam konten terkait pemerintahan.

Ada pula responden yang sering menemukan hoaks di konten mengenai bencana (8,56%), keagamaan (8,18%), kesehatan (6,78%), pendidikan (2,58%), dan internasional (1,53%). Mayoritas responden menemukan hoaks di media sosial (59,75%), diikuti media chat alias percakapan (29,12%), dan situs berita (11,12%). Survei ini dilakukan pada 18 Desember 2023-19 Januari 2024 terhadap 8.720 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi

¹¹⁷ Siregar, H. (2018). Hoax dan Post-Truth Politics di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 101-115.

Indonesia.¹¹⁸ Hasil survei ini menimbulkan kekhawatiran serius mengingat dampak potensial hoaks politik terhadap proses demokrasi. **Ketiga, Polarisasi politik digital.** Polarisasi politik digital telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam lanskap perpolitikan Indonesia. Pemanfaatan kanal komunikasi digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, telah menciptakan ruang diskusi politik yang dinamis namun seringkali terpolarisasi. Generasi muda sering kali terjebak dalam "*echo chambers*" atau "*filter bubbles*". Algoritma platform digital cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, yang dapat memperkuat keyakinan yang sudah ada dan membatasi paparan terhadap pandangan yang berbeda.¹¹⁹

Berdasarkan data berbagai sumber menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda: 1) Peningkatan Polarisasi: Survei yang dilakukan oleh CSIS Indonesia pada akhir 2023 menunjukkan bahwa 68% responden generasi muda (usia 17-35 tahun) mengalami peningkatan paparan terhadap konten politik yang sangat terpolarisasi di media sosial.¹²⁰ 2) Penyebaran Disinformasi: Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat peningkatan 45% dalam penyebaran disinformasi politik melalui platform digital sepanjang tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 60% target penyebaran adalah pengguna berusia di bawah 30 tahun.¹²¹ 3) Penurunan Kualitas Diskursus: Analisis sentimen yang dilakukan oleh AI Lab Universitas Gadjah Mada terhadap 10 juta postingan media sosial selama 2023-2024 menunjukkan penurunan 25% dalam kualitas diskursus politik digital, ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa kasar dan serangan terhadap orang lain.¹²²

¹¹⁸ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024.

¹¹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Studi tentang Echo Chambers dalam Media Sosial Indonesia. Jakarta: Kemkominfo.

¹²⁰ CSIS Indonesia. (2023). Survei Nasional: Polarisasi Politik di Era Digital.

¹²¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Laporan Tahunan Penanganan Disinformasi 2023.

¹²² AI Lab UGM. (2024). Analisis Sentimen Diskursus Politik Online 2023-2024

4) Dampak pada Partisipasi Politik: Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal 2024 mengungkapkan bahwa 40% pemilih muda merasa enggan berpartisipasi dalam diskusi politik digital karena tingginya tingkat permusuhan dan polarisasi.¹²³ Dampak dari polarisasi terhadap konsolidasi demokrasi sangat signifikan; Pertama, polarisasi dapat melemahkan kemampuan masyarakat untuk berkompromi dan mencapai solusi bersama atas masalah-masalah nasional. Kedua, polarisasi yang ekstrem dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi demokratis dan proses politik. Ketiga, polarisasi dapat meningkatkan risiko radikalisasi dan ekstremisme di kalangan generasi muda.

Berdasarkan uraian faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan kanal komunikasi digital dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi diatas, dapat dipetakan menggunakan analisis PESTE yang mengkaji dengan indikator Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan solusi dari suatu isu untuk memberikan hasil analisis yang komprehensif. Secara umum, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari aspek faktor pendukung dan penghambat, jika ditinjau dari analisis PESTL yang menganalisis faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi dan hukum dengan hasil seperti di tabel 1.1

Tabel 1.1. Matriks Analisis PESTL

<i>Political</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Social</i>
Polarisasi politik digital yang diperkuat oleh algoritma media sosial dapat memecah belah masyarakat dan menghambat dialog konstruktif. Hoaks dan disinformasi yang disebarkan oleh aktor-aktor politik tertentu dapat merusak kepercayaan	Aksesibilitas teknologi dan kesenjangan digital sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi. Harga perangkat teknologi, biaya internet, dan tingkat pendapatan masyarakat akan memengaruhi kemampuan generasi	Literasi digital, antusiasme partisipasi politik, dan polarisasi politik digital dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat pendidikan, norma sosial, dan budaya politik.

¹²³ Lembaga Survei Indonesia. (2024). Survei Nasional: Partisipasi Politik Generasi Muda.

publik terhadap institusi demokrasi.	muda dalam mengakses dan memanfaatkan kanal komunikasi digital.	
<p>Solusi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah dan K/L memperkuat regulasi media sosial dan platform digital untuk mengurangi penyebaran informasi yang menyesatkan - Mendorong dialog lintas partai dan ideologi di ruang digital - Meningkatkan pendidikan politik bagi generasi muda 	<p>Solusi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah dan K/L terkait Memberikan subsidi atau insentif untuk akses internet dan perangkat digital bagi kelompok ekonomi lemah - Mendorong investasi infrastruktur digital di daerah terpencil - Mengembangkan program kemitraan pemerintah-swasta untuk memperluas jangkauan internet 	<p>Solusi;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemerintah, K/L terkait mengintegrasikan pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah. - Menyelenggarakan program pelatihan literasi digital untuk berbagai kelompok usia - Mendorong kampanye kesadaran sosial tentang penggunaan media digital yang bertanggung jawab

<i>Technological</i>	<i>Legal</i>
Teknologi komunikasi digital dapat disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memicu polarisasi, dan Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah.	Regulasi terkait perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan penanganan ujaran kebencian sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif bagi partisipasi politik.
<p>Solusi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah/KL terkait meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur digital nasional - Mendorong inovasi teknologi untuk mengatasi keterbatasan akses di daerah terpencil - Mengembangkan aplikasi dan platform yang user-friendly untuk partisipasi politik digital 	<p>Solusi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah, K/L Terkait memperkuat kerangka hukum yang melindungi data pribadi dan keamanan siber, serta menindak tegas pelaku ujaran kebencian dan penyebar hoaks. - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan data pengguna dan moderasi konten.

14. **Identifikasi Penyebab terwujudnya konsolidasi demokrasi dan Dampaknya Untuk Demokrasi Digital.**

Konsolidasi demokrasi merupakan proses penting dalam memperkuat fondasi demokrasi suatu negara. Dalam konteks pemanfaatan kanal komunikasi digital telah menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi terwujudnya konsolidasi demokrasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan media digital telah memberikan dampak yang besar terhadap dinamika politik dan partisipasi publik dalam sistem demokrasi. Mengidentifikasi penyebab yang mempengaruhi terwujudnya konsolidasi demokrasi dari pemanfaatan kanal komunikasi digital memerlukan analisis mendalam dari berbagai perspektif teoretis dan kontekstual. Berikut adalah analisis yang memadukan Teori Konsolidasi Demokrasi (Linz & Stepan), Teori Komunikasi Politik Digital (Chadwick & Howard), Teori Demokrasi Digital (Dahlberg & Papacharissi), serta perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional.

Menurut **Teori Konsolidasi Demokrasi (Linz & Stepan)**, menekankan pentingnya institusi yang kuat, budaya politik demokratis, dan masyarakat sipil yang aktif. Dalam konteks digital, generasi muda menjadi aktor kunci. Partisipasi generasi muda di kanal komunikasi digital dapat memperkuat masyarakat sipil, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta membentuk budaya politik yang lebih demokratis. Namun, partisipasi ini harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai untuk menghindari disinformasi dan polarisasi. Sedangkan menurut **Teori Komunikasi Politik Digital (Chadwick & Howard)**, menekankan fokus pada peran komunikasi digital dalam membentuk opini publik, memobilisasi dukungan, dan mempengaruhi proses politik. Generasi muda, sebagai pengguna aktif media sosial dan platform online lainnya, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi wacana politik dan mendorong perubahan. Namun, potensi manipulasi informasi dan polarisasi online juga menjadi ancaman serius bagi konsolidasi demokrasi. Penyebab konsolidasi demokrasi dapat diidentifikasi melalui; Akses informasi yang lebih luas, Partisipasi politik yang lebih inklusif, dan Kampanye politik yang lebih transparan, serta Dampaknya, Komunikasi politik digital yang efektif dapat meningkatkan kualitas

demokrasi, mendorong partisipasi yang lebih bermakna dan memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Selain itu menurut **Teori Demokrasi Digital (Dahlberg & Papacharissi)**, menekankan peran teknologi digital dalam membentuk ruang publik baru dan memfasilitasi partisipasi demokratis. Dalam konteks pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda memiliki pengaruh signifikan terhadap proses konsolidasi demokrasi. Dahlberg menekankan pentingnya ruang publik digital sebagai arena deliberasi. Generasi muda memanfaatkan platform digital untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif dan beragam. Ini mendorong pluralisme ide dan memperkuat fondasi demokrasi deliberatif. Namun, tantangannya adalah mengelola polarisasi dan memastikan kualitas diskusi tetap terjaga. Papacharissi menggarisbawahi potensi internet untuk meningkatkan partisipasi politik. Generasi muda menggunakan media sosial dan aplikasi mobile untuk terlibat dalam aktivitas digital, petisi online, dan kampanye crowdfunding. Ini memperluas bentuk partisipasi politik di luar saluran tradisional, mendukung demokrasi partisipatif. Tantangannya adalah memastikan partisipasi online diterjemahkan ke dalam aksi nyata dan perubahan kebijakan.

Ditinjau dari perkembangan lingkungan strategis dalam mengidentifikasi penyebab yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi melalui kanal komunikasi digital diperoleh sebagai berikut; Pada tingkat **Global**, Dengan meningkatnya konektivitas global dan arus informasi lintas batas membuka peluang bagi generasi muda untuk belajar dari praktik demokrasi di negara lain. Namun, disinformasi yang disponsori negara dan kampanye pengaruh asing menjadi ancaman serius. Pada tingkat **Regional**: Melalui kerjasama regional dalam literasi digital dan keamanan siber dapat memperkuat demokrasi digital, disatu sisi, ketegangan geopolitik dan persaingan antarnegara dapat memicu manipulasi informasi dan polarisasi. Pada tingkat **Nasional**: Melalui kebijakan pemerintah yang mendukung infrastruktur digital, literasi digital, dan kebebasan berekspresi online dapat memperkuat partisipasi politik generasi muda. Namun, regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi dan pengawasan online yang berlebihan dapat menghambat demokrasi digital. Pemanfaatan kanal komunikasi digital

telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam era digital yang terus berkembang, konsolidasi demokrasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi politik, transparansi, dan akuntabilitas.

Pertama, Penyebab terwujudnya konsolidasi demokrasi.

Kehadiran platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai forum online telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berpendapat, dan berpartisipasi dalam politik. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik dapat mengancam konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan platform digital untuk memastikan bahwa kanal komunikasi digital digunakan secara bertanggung jawab dan konstruktif untuk memperkuat demokrasi. 1) **Partisipasi politik digital.** Partisipasi politik digital telah menjadi fenomena yang semakin signifikan dalam lanskap demokrasi kontemporer, terutama di kalangan generasi muda. Pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh kaum muda ini berperan penting dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Data menunjukkan bahwa 71% individu berusia 18-29 tahun menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, dibandingkan dengan hanya 40% dari kelompok usia 65 tahun ke atas.¹²⁴ Kondisi ini mencerminkan pergeseran arena partisipasi politik ke ruang digital, terutama di kalangan Generasi muda.

Salah satu manifestasi partisipasi politik digital adalah aktivitas digital. Pada tahun 2023, kampanye hashtag terkait isu-isu sosial dan politik mencapai rata-rata 500 juta postingan per hari di platform seperti Twitter dan Instagram. Gerakan seperti #BlackLivesMatter dan #ClimateAction telah menunjukkan bagaimana aktivitas online dapat memobilisasi massa dan mempengaruhi agenda politik. Dari pemanfaatan kanal komunikasi digital juga telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hasil Survei global menunjukkan bahwa 63% responden merasa lebih mudah mengakses informasi pemerintah melalui platform digital.¹²⁵

¹²⁴ Pew Research Center. (2023). Social Media and Political Engagement.

¹²⁵ United Nations E-Government Survey. (2022). Digital Government in the Decade of Action for

Di Indonesia, inisiatif seperti LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) telah memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi warga dan akuntabilitas pemerintah. Sejak peluncurannya pada tahun 2011, platform ini telah memfasilitasi lebih dari 1,5 juta laporan warga kepada pemerintah.¹²⁶ LAPOR! merupakan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi dan terpusat, dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Platform ini memungkinkan warga untuk melaporkan berbagai masalah, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik, langsung kepada instansi pemerintah terkait. Efektivitas LAPOR! juga terlihat dari tingkat penyelesaian laporan, menurut data tahun 2022, sekitar 85% dari total laporan yang masuk berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh instansi terkait.¹²⁷ Hal tersebut menunjukkan komitmen dari pemerintah dalam merespons aspirasi dan keluhan masyarakat. Namun, partisipasi politik digital juga menghadapi tantangan, *Fenomena echo chamber dan filter bubble* dapat memperkuat polarisasi politik. *Echo chamber* bak ruang gema raksasa di dunia maya. Dalam hal ini, generasi muda hanya mendengar suara-suara yang sejalan dengan pandangan mereka. Algoritma media sosial dengan cerdas menyuguhkan konten-konten yang sesuai preferensi, menciptakan ilusi bahwa pandangan mereka adalah kebenaran tunggal. Sementara itu, *filter bubble* bekerja layaknya gelembung informasi yang membatasi pandangan generasi muda.

Generasi muda terkungkung dalam lingkaran pertemanan dan informasi yang homogen, terisolasi dari perspektif berbeda. Akibatnya, pemahaman mereka tentang isu-isu sosial dan politik menjadi sempit dan dangkal. Ketika generasi muda terjebak dalam *echo chamber* dan *filter bubble*, konsolidasi demokrasi menjadi terancam. Partisipasi politik mereka menjadi dangkal, didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan bias. Kemampuan generasi muda untuk berpikir kritis dan berempati terhadap pandangan berbeda pun terkikis. Studi menunjukkan bahwa 74% pengguna

Sustainable Development.

¹²⁶ Kementerian PANRB. (2023). Laporan Tahunan LAPOR!

¹²⁷ Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Pengaduan Publik

media sosial cenderung berinteraksi dengan konten yang sesuai dengan pandangan politik mereka. Disinformasi juga menjadi ancaman serius, Pada pemilu 2020 di AS, lebih dari 1 miliar postingan yang mengandung disinformasi politik terdeteksi di berbagai platform media sosial.¹²⁸ Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda. Meski demikian, partisipasi politik digital tetap menjadi katalis penting dalam konsolidasi demokrasi. Di Indonesia, partisipasi politik digital generasi muda telah berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi pemilih. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%, dengan kontribusi signifikan dari pemilih muda yang aktif di media sosial.¹²⁹ Generasi muda memiliki peran krusial dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi di era digital. Oleh karena itu untuk memaksimalkan potensi partisipasi politik digital dalam konsolidasi demokrasi, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat sipil. Inisiatif seperti program pendidikan kewarganegaraan digital dan regulasi yang mendukung kebebasan berekspresi online sambil memitigasi risiko disinformasi menjadi krusial. 2) **Transparansi informasi.** Transparansi informasi telah menjadi katalis utama dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, terutama melalui pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda.

Data menunjukkan bahwa 78% generasi muda (usia 18-29 tahun) di negara-negara demokrasi menggunakan internet sebagai sumber utama informasi politik, dibandingkan dengan 45% dari kelompok usia di atas 50 tahun.¹³⁰ Generasi muda, yang sering disebut sebagai "digital natives", tumbuh di era di mana internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mencari informasi politik secara online bukan hanya pilihan, tetapi juga kebiasaan yang sudah mengakar. Platform seperti media sosial, situs berita online, dan forum diskusi telah menjadi ekosistem informasi yang kaya dan mudah diakses. Preferensi ini didorong oleh beberapa faktor, Pertama, aksesibilitas dan kecepatan internet dalam menyajikan informasi terkini sangat sesuai dengan gaya hidup dinamis generasi muda. Kedua,

¹²⁸ Election Integrity Partnership. (2021). The Long Fuse: Misinformation and the 2020 Election

¹²⁹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). Laporan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

¹³⁰ Pew Research Center. (2023). Digital Politics: How Young Adults Get Their Political News.

internet menawarkan keragaman perspektif yang lebih luas dibandingkan media tradisional, memungkinkan pengguna untuk membandingkan berbagai sumber dan membentuk opini mereka sendiri. Selain itu, karakteristik interaktif media digital memungkinkan generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi politik. Kontras dengan kelompok usia di atas 50 tahun, di mana hanya 45% yang mengandalkan internet sebagai sumber utama informasi politik, mencerminkan perbedaan generasi dalam adopsi teknologi. Kelompok usia yang lebih tua cenderung lebih bergantung pada sumber tradisional seperti televisi, koran cetak, dan radio. Implikasi dari tren ini sangat luas. Di satu sisi, hal ini dapat memperluas partisipasi politik di kalangan anak muda, meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu politik, dan memfasilitasi mobilisasi politik yang lebih cepat. Namun dengan kondisi ini, ada juga kekhawatiran terkait fenomena ini, dimana prevalensi disinformasi dan berita palsu online menimbulkan tantangan baru dalam membangun elektrorat yang terinformasi dengan baik.

Platform edukasi politik digital, seperti *Vote Smart* di AS, mencatat peningkatan penggunaan sebesar 300% di kalangan pemilih muda selama periode pemilu.¹³¹ Di Indonesia, aplikasi seperti "Pemilu Apps" yang menyediakan informasi tentang kandidat dan proses pemilu, diunduh lebih dari 5 juta kali menjelang Pemilu 2019. Media sosial telah menjadi platform kunci untuk transparansi dan akuntabilitas. Studi menunjukkan bahwa 68% politisi di negara-negara demokrasi sekarang menggunakan Twitter untuk berkomunikasi langsung dengan konstituen mereka. Di Indonesia, penggunaan hashtag #TransparansiAPBN mencapai puncaknya dengan lebih dari 1 juta tweet selama debat anggaran nasional 2022.¹³² Angka ini mencerminkan tingginya minat dan partisipasi publik dalam isu-isu keuangan negara, yang sebelumnya sering dianggap sebagai domain eksklusif para elit politik dan ekonomi. Hashtag #TransparansiAPBN tidak hanya menjadi trending topic, tetapi juga berfungsi sebagai ruang diskusi virtual di mana

¹³¹ Vote Smart. (2023). Annual Report on Voter Education and Engagement.

¹³² Drone Emprit Academic. (2022). Analisis Media Sosial: Tren #TransparansiAPBN pada Debat Anggaran Nasional 2022.

generasi muda, aktivis, dan bahkan pejabat pemerintah terlibat dalam dialog tentang prioritas anggaran nasional. Banyak tweet berisi infografis yang menyederhanakan data anggaran kompleks, membuatnya lebih mudah dipahami oleh publik umum. Pemerintah dan lembaga pemilu juga mengadopsi strategi komunikasi digital untuk menjangkau pemilih muda, misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) aktif menggunakan media sosial dan aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi tentang proses pemilu, yang berhasil meningkatkan partisipasi pemilih muda sebesar 12% pada Pemilu 2019 dibandingkan Pemilu 2014.

3) **Ruang diskusi publik digital.** Ruang diskusi publik digital telah menjadi arena penting dalam proses konsolidasi demokrasi, terutama bagi generasi muda yang memanfaatkan kanal komunikasi digital secara intensif. Hal ini mencerminkan transformasi ruang publik di era digital, memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan dinamis dalam diskursus demokratis. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 98,6% dari total 215,63 juta pengguna internet di Indonesia adalah pengguna aktif media sosial¹³³. Hal ini mencerminkan potensi luar biasa dari ruang diskusi digital dalam melibatkan generasi muda dalam proses politik. Lebih lanjut, ruang diskusi publik digital memfasilitasi partisipasi aktif generasi muda dalam proses pengambilan keputusan.

Kampanye digital, petisi digital, dan gerakan akar rumput yang diinisiasi melalui platform digital telah terbukti mampu mempengaruhi kebijakan publik dan mendorong perubahan sosial. Media sosial menjadi platform utama untuk diskusi politik digital. Survei pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 68,2% pengguna media sosial berusia 18-35 tahun di Indonesia menggunakan platform digital untuk mengakses informasi politik dan terlibat dalam diskusi terkait isu-isu nasional.¹³⁴ Disamping itu, ruang diskusi publik digital juga berperan penting dalam pendidikan politik dan peningkatan literasi digital generasi muda. Hal ini sangat penting dalam memperkuat fondasi demokrasi, karena generasi muda yang terdidik dan

¹³³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023-2024," (Jakarta: APJII, 2024).

¹³⁴ We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: Indonesia.

terinformasi adalah pilar utama dari sistem pemerintahan yang sehat. Ruang diskusi publik digital telah menjadi katalis penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.

Kedua, Dampak terhadap demokrasi digital. Demokrasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam proses politik dan demokrasi di Indonesia dan di seluruh dunia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berpartisipasi dalam kehidupan politik, mulai dari kampanye politik hingga interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap demokrasi yang perlu dipahami dengan cermat.

1) **Peningkatan keterlibatan warga negara.** Peningkatan keterlibatan warga negara, terutama generasi muda, dalam pemanfaatan kanal komunikasi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan demokrasi digital di Indonesia. Media sosial, forum online, dan platform digital lainnya telah menjadi ruang publik baru bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapat, bertukar informasi, dan berpartisipasi dalam wacana publik. Dalam kurun waktu 2019-2024, terjadi lonjakan dramatis dalam penggunaan platform digital untuk partisipasi politik di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini tercermin dari data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 78% pemilih muda (usia 17-35 tahun) aktif menggunakan media sosial dan platform online untuk mengakses informasi politik dan terlibat dalam diskusi publik.¹³⁵ Kanal komunikasi digital juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Generasi muda dapat memantau kinerja pemerintah, mengakses informasi publik, dan melaporkan pelanggaran melalui platform digital serta berperan sebagai pengawas independen terhadap pemerintah dan lembaga publik lainnya. Dampak keterlibatan digital terhadap konsolidasi demokrasi terlihat dalam beberapa aspek, sebagai berikut: a) Peningkatan Transparansi. Peningkatan transparansi pemerintah Indonesia telah menjadi

¹³⁵ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023

salah satu dampak signifikan dari meningkatnya keterlibatan warga negara melalui media sosial. Tekanan publik yang konsisten dan terorganisir melalui platform digital telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju keterbukaan yang lebih besar. Pada tahun 2023, indeks keterbukaan informasi publik Indonesia mencatat peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2019, menandai kemajuan substansial dalam hal transparansi pemerintahan.

b) **Mobilisasi Cepat.** Mobilisasi cepat merujuk pada upaya yang dilakukan untuk menggerakkan dan melibatkan generasi muda dalam partisipasi demokrasi digital. Hal ini penting karena generasi muda merupakan bagian penting dari populasi yang memiliki akses luas terhadap teknologi digital dan media sosial. Generasi muda memiliki potensi besar dalam mempengaruhi perubahan sosial dan politik. Dengan meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam demokrasi digital, mereka dapat memberikan suara mereka, berbagi ide, dan memperjuangkan isu-isu yang mereka anggap penting melalui kanal komunikasi digital. Kanal komunikasi digital seperti platform media sosial, situs web pemerintah, dan aplikasi berbasis online menjadi sarana penting bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapat mereka, berdiskusi dengan sesama, serta membangun jaringan yang mendukung tujuan demokratis. Partisipasi aktif generasi muda akan membantu memperkuat nilai-nilai demokratis, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan dan responsif. Dengan memberikan ruang bagi suara generasi muda melalui teknologi modern, kita dapat memperkuat fondasi demokratis negara dan menjaga keberlanjutan sistem politik yang inklusif.

c) **Literasi Politik yang Meningkat:** Engagement digital telah meningkatkan pemahaman politik. Survei 2023 menunjukkan peningkatan 30% dalam literasi politik di kalangan pengguna aktif media sosial dibandingkan non-pengguna.¹³⁶

2) **Transformasi institusi demokrasi.** Perkembangan pesat teknologi digital dan meluasnya penggunaan kanal komunikasi digital telah

¹³⁶ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*.

membawa perubahan signifikan dalam lanskap demokrasi. Institusi-institusi demokrasi, seperti parlemen, partai politik, dan lembaga pemerintahan, tidak lagi dapat mengabaikan peran penting kanal komunikasi digital dalam menjalankan fungsi dan memperkuat legitimasinya.¹³⁷ Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat telah memanfaatkan kanal komunikasi digital untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Siaran langsung rapat paripurna, forum diskusi online, dan media sosial parlemen telah membuka ruang publik baru bagi warga negara untuk terlibat dalam proses legislasi dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Partai politik juga telah beradaptasi dengan era digital dengan memanfaatkan kanal komunikasi digital untuk merangkul partisipasi dan memobilisasi massa. Kampanye digital, penggalangan dana digital, dan penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dengan konstituen telah menjadi strategi kunci bagi partai politik dalam memenangkan dukungan publik. Lembaga pemerintahan juga telah memanfaatkan kanal komunikasi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas. Layanan publik online, pengaduan masyarakat melalui platform digital, dan keterbukaan informasi melalui situs web pemerintah telah memberikan kemudahan bagi warga negara untuk mengakses layanan publik dan memantau kinerja pemerintah.

Demokrasi digital juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas institusi demokrasi. Informasi publik kini lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital, sehingga memudahkan pemantauan kinerja pemerintah dan lembaga publik lainnya. Disamping itu demokrasi digital telah melahirkan aktor-aktor baru dalam lanskap politik, seperti influencer, aktivis online, dan komunitas digital. Mereka memanfaatkan platform digital untuk menggalang dukungan, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi opini publik. Transformasi institusi demokrasi di era digital tidak lepas dari tantangan, seperti, Disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik di kanal komunikasi digital dapat mengancam kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi institusi

¹³⁷ M. Alfian Alfian, "Demokrasi Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang," Jurnal Ilmu Politik, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 231-250.

demokrasi untuk mengembangkan strategi literasi digital dan regulasi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan memanfaatkan kanal komunikasi digital secara optimal, institusi demokrasi dapat meningkatkan partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik.

3) **Tantangan keamanan dan privasi data.** Ancaman terhadap keamanan dan privasi data pribadi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap penggunaan kanal digital untuk partisipasi politik. Keamanan data juga merupakan indikator dari integritas pemilu. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kombinasi dari berbagai jenis data pribadi di atas dapat dengan mudah digunakan oleh partai politik maupun aktor politik lain untuk komunikasi politik dan kegiatan kampanye, misalnya dengan melakukan profiling dan microtargeting. Di sisi lain, terdapat potensi penggunaan data pribadi secara abusif dan manipulatif, yang dapat memengaruhi dan memanipulasi suara, bahkan mengintimidasi pemilih. Banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi pemilih di berbagai negara, seperti yang terjadi di Hongaria pada Pemilu 2022, maupun kasus Cambridge Analytica pada Pemilu AS pada 2016 seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi regulator, termasuk penyelenggara pemilu, untuk memitigasi risiko penyalahgunaan data pribadi dalam kontestasi pemilu.

4) **Penyebaran Disinformasi malinformasi atau misinformasi dan Ujaran Kebencian.** Kanal komunikasi digital, seperti media sosial dan platform pesan instan, memungkinkan penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian secara masif dan cepat. Hal ini dapat memicu polarisasi politik, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat dialog konstruktif yang diperlukan untuk konsolidasi demokrasi. Penelitian oleh Wardle dan Derakhshan (2017) menunjukkan bahwa disinformasi online dapat merusak kepercayaan pada institusi demokrasi dan mengurangi partisipasi politik.¹³⁸ Disinformasi, atau informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui platform digital. Konten-konten palsu, hoaks, dan narasi yang memecah belah dapat dengan mudah

¹³⁸ Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe.

dibagikan dan dipercaya oleh masyarakat, terutama jika dikemas dengan menarik dan memicu emosi. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan polarisasi di antara masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat konsolidasi demokrasi. Ujaran kebencian, yang menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka, juga marak terjadi di platform digital. Ujaran kebencian dapat memicu konflik, diskriminasi, dan kekerasan, serta merusak kohesi sosial yang penting bagi demokrasi yang sehat. Kebebasan berpendapat memang merupakan hak asasi manusia, tetapi ujaran kebencian yang menghasut permusuhan dan kekerasan tidak dapat dibenarkan.

Disinformasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, mengurangi partisipasi politik, dan menghambat dialog yang konstruktif. Ujaran kebencian dapat memecah belah masyarakat, memicu konflik, dan mengancam hak asasi manusia. Menyikapi permasalahan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di platform digital. Platform digital perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam moderasi konten, serta mengembangkan teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi dan menangkal disinformasi. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan kritis terhadap informasi yang mereka terima, serta menghindari menyebarkan konten yang tidak terverifikasi atau mengandung ujaran kebencian. Secara umum dari uraian diatas, terdapat beberapa dampak yang dari penyebab terwujudnya konsolidasi demokrasi dan dampaknya untuk demokrasi digital, jika ditinjau dari analisis PESTL yang menganalisis faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi dan hukum, dengan hasil seperti di tabel 1.2

Tabel 1.2. Matrik Analisis PESTL

<i>Political</i>	<i>Ekonomic</i>	<i>Social</i>
Regulasi yang longgar mengenai penggunaan platform digital untuk kegiatan politik dapat mendorong partisipasi	Kesenjangan ekonomi digital dapat menghambat akses sebagian masyarakat terhadap informasi dan	Polarisasi dan penyebaran ujaran kebencian dapat merusak kohesi sosial. Pendidikan,

online, tetapi juga membuka celah manipulasi.	partisipasi politik digital.	kewarganegaraan digital yang menekankan nilai-nilai toleransi dan dialog menjadi krusial.
Solusi; Pemerintah, K/L terkait menetapkan regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan platform digital untuk kegiatan politik, termasuk sanksi bagi pelanggaran.	Solusi; Pemerintah, K/L terkait meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital dan literasi digital, terutama di daerah tertinggal.	Solusi; Pemerintah dan K/L terkait mendorong pendidikan kewarganegaraan digital yang menekankan nilai-nilai demokrasi dan toleransi.

<i>Technological</i>	<i>Legal</i>
Ancaman keamanan siber dan penyalahgunaan data pribadi juga meningkat.	Demokrasi digital dapat terancam jika tidak ada perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna platform digital.
Solusi; Pemerintah, K/L melakukan investasi dalam pengembangan teknologi yang mendukung demokrasi digital, seperti platform partisipasi publik dan sistem keamanan siber.	Solusi; Pemerintah, K/L terkait memperkuat kerangka hukum yang melindungi hak-hak digital warga negara dan menindak tegas pelanggaran.

15. Strategi pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda guna terwujudnya Konsolidasi Demokrasi.

Di era digital yang terus berkembang pesat, generasi muda telah menjadi aktor kunci dalam membentuk lanskap komunikasi politik. Generasi muda yang dikenal dengan kreativitas dan inovasinya, memerlukan adanya strategi dalam pemanfaatan kanal komunikasi digital untuk berinteraksi dalam menyampaikan aspirasinya. Strategi pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi perlu mempertimbangkan beberapa perspektif teoritis dan konteks lingkungan strategis. **Menurut Perspektif Teori Konsolidasi Demokrasi (Juan J. Linz dan Alfred Stepan).** Teori ini menekankan pentingnya institusi yang kuat, budaya politik demokratis, dan masyarakat sipil yang aktif. Diharapkan generasi muda dapat memanfaatkan kanal komunikasi digital untuk

membentuk komunitas online, menggalang dukungan untuk isu-isu penting, dan mengorganisir gerakan sosial secara virtual, Mendorong Akuntabilitas, dan berpartisipasi dalam diskusi online, debat publik, dan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong nilai-nilai demokrasi.

Teori Komunikasi Politik Digital (Chadwick & Howard), Teori ini menyoroti peran komunikasi digital dalam membentuk opini publik dan memobilisasi aksi politik. Generasi muda dapat memanfaatkan kanal komunikasi digital untuk Mengintegrasikan strategi media tradisional dan digital dalam kampanye politik, Mengembangkan pesan politik yang personal dan relevan, dan Membangun jaringan aktivis online-offline untuk isu-isu demokrasi. Sedangkan **Teori Demokrasi Digital (Dahlberg & Papacharissi)**. Teori ini berfokus pada bagaimana teknologi digital dapat memperluas partisipasi politik dan meningkatkan kualitas demokrasi. Generasi muda dapat mengimplemntasikan strategi dengan melakukan; Mengembangkan platform diskusi yang mendorong debat rasional dan inklusif, Membuat konten edukatif tentang cara mengevaluasi informasi digital, dan Mendorong Produksi Konten Politik digital.

Lingkungan strategis global, regional, dan nasional membentuk lanskap kompleks yang mempengaruhi strategi pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dalam upaya konsolidasi demokrasi. Analisa yang dapat diambil sebagai berikut; Pada **Tingkat Global**. Peluang: Melalui konektivitas global yang semakin meningkat memungkinkan generasi muda untuk mengakses informasi dari seluruh dunia, belajar dari praktik demokrasi di negara lain, dan membangun jaringan solidaritas internasional. Sedangkan Tantangan yang harus dihadapi adalah: Globalisasi juga membawa tantangan berupa penyebaran disinformasi, propaganda, dan ujaran kebencian yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Selain itu, intervensi asing melalui kampanye disinformasi dan manipulasi informasi dapat mengancam integritas proses demokrasi.

Tingkat Lingkungan Strategis Regional, terdapat peluang dan tantangan sebagai berikut; **Peluang**, Kerjasama regional dalam bidang teknologi dan informasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan literasi digital

generasi muda. Inisiatif bersama untuk memerangi disinformasi dan ujaran kebencian di tingkat regional dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan kondusif bagi partisipasi politik. **Tantangan**, Ketegangan geopolitik dan persaingan antarnegara di kawasan dapat memicu polarisasi politik dan penyebaran informasi yang memecah belah. Perbedaan tingkat perkembangan teknologi dan infrastruktur digital antarnegara dapat menciptakan kesenjangan digital yang menghambat partisipasi politik yang inklusif. Sedangkan pada tingkat Lingkungan Strategis Nasional. **Peluang** yang dapat diambil; Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan infrastruktur digital, literasi digital, dan kebebasan berekspresi online dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik generasi muda. Inisiatif pemerintah untuk melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. **Tantangan:** Regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi, pengawasan online yang berlebihan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat menghambat partisipasi politik generasi muda. Kesenjangan digital yang masih ada di tingkat nasional dapat menghambat aksesibilitas dan partisipasi politik yang setara.

Dalam pembahasan ini akan menguraikan strategi yang dapat diterapkan oleh generasi muda dalam memanfaatkan kanal komunikasi digital untuk mendorong konsolidasi demokrasi, sebagai berikut; **Pertama, Pemberdayaan Literasi Digital Kolaboratif.** 1) Pemberdayaan literasi digital melalui kurikulum bersama yang mencakup pendidikan formal dan non-formal merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam konsolidasi demokrasi di era digital. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali kaum muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memanfaatkan kanal komunikasi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan formal, melakukan integrasi literasi digital ke dalam kurikulum nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan mata pelajaran khusus atau dengan mengintegrasikan elemen literasi digital ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti; Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan

Sosial, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.¹³⁹ Materi yang diajarkan mencakup pemahaman tentang ekosistem digital, verifikasi informasi, etika berkomunikasi online, serta analisis kritis terhadap konten digital.

Sementara itu, pendidikan non-formal memiliki peran penting dalam menjangkau kelompok yang mungkin tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Program-program seperti workshop, pelatihan singkat, dan kursus daring dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik berbagai kelompok masyarakat. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pemuda, dan platform digital dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program-program ini. Kurikulum bersama ini perlu mencakup beberapa aspek kunci: Memberikan pengetahuan tentang cara kerja platform digital, algoritma, dan dampaknya terhadap demokrasi, Mengajarkan metode pemeriksaan fakta (*fact-checking*), identifikasi sumber terpercaya, dan pengenalan disinformasi, Menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam konteks digital, termasuk toleransi, pluralisme, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan Mengembangkan keterampilan dalam menciptakan konten yang informatif, persuasif, dan konstruktif untuk mendukung diskursus demokratis.

Implementasi kurikulum bersama ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, institusi pendidikan, platform digital, dan stakeholder terkait. Pemerintah dapat berperan dalam menyusun kerangka kebijakan dan standar kompetensi, sementara institusi pendidikan bertanggung jawab atas pengembangan dan penyampaian materi. Platform digital dapat berkontribusi dengan menyediakan *tools* dan *resources*, serta berbagi *best practices* dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran.¹⁴⁰ Pemberdayaan literasi digital kolaboratif dapat dilakukan melalui Pemahaman etika berkomunikasi di ruang digital. Pemahaman etika berkomunikasi di ruang digital menjadi komponen krusial dalam upaya pemberdayaan literasi digital yang kolaboratif, terutama dalam konteks pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda untuk

¹³⁹ Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What's the difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 15-27.

¹⁴⁰ Van Dijk, J. A., & Van Deursen, A. J. (2014). *Digital skills: Unlocking the information society*. Palgrave Macmillan.

mewujudkan konsolidasi demokrasi. Etika berkomunikasi di ruang digital mencakup berbagai aspek, mulai dari kesopanan dalam berinteraksi, penghormatan terhadap privasi, hingga tanggung jawab dalam menyebarkan informasi.

2) Pemberdayaan literasi digital yang berfokus pada etika komunikasi harus mampu menghadapi tantangan spesifik dalam konteks demokrasi Indonesia. Isu-isu seperti ujaran kebencian, hoaks, dan polarisasi politik di media sosial menjadi perhatian serius. Pendekatan kolaboratif dalam literasi digital harus mampu membekali generasi muda dengan keterampilan kritis untuk mengidentifikasi, menyikapi, dan melawan praktik-praktik komunikasi yang tidak etis dan berpotensi merusak tatanan demokrasi. Generasi muda perlu didorong untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga kontributor aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat bagi diskursus demokratis. Hal ini termasuk kemampuan untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif, menghargai perbedaan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi secara online dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan kolaboratif dalam pemberdayaan literasi digital yang berfokus pada etika komunikasi, diharapkan generasi muda Indonesia dapat memanfaatkan kanal komunikasi digital secara optimal untuk memperkuat konsolidasi demokrasi guna menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan demokrasi di era digital.

3) Pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi merupakan komponen vital dalam upaya pemberdayaan literasi digital yang bertujuan untuk mendukung pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda guna mewujudkan konsolidasi demokrasi. Generasi muda harus memiliki kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi menjadi keterampilan esensial sebagai agen demokrasi. Upaya kolaboratif dalam pemberdayaan literasi digital telah mulai diintensifkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan program "Siberkreasi" yang berfokus pada peningkatan literasi digital masyarakat, termasuk komponen

berpikir kritis. Program Siberkreasi merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan produktif. Fokus utama program ini adalah peningkatan literasi digital masyarakat, dengan penekanan khusus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi dan memproduksi konten digital,¹⁴¹ program ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri digital. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan generasi muda Indonesia dapat memanfaatkan kanal komunikasi digital secara lebih bertanggung jawab dan konstruktif. Hal ini pada gilirannya akan mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi yang ditandai dengan partisipasi politik yang berkualitas, dialog publik yang sehat, dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pemanfaatan kanal komunikasi digital yang lebih bijak oleh generasi muda, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Kedua, Pengembangan Platform dan Aplikasi Demokrasi Digital.

1) Pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda telah menjadi fenomena yang tak terbantahkan dalam lanskap politik modern. Generasi muda, yang akrab dengan teknologi dan media sosial, semakin aktif menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan bahkan menggalang aksi politik melalui platform digital. Salah satu langkah maju yang dapat diambil adalah menciptakan aplikasi partisipasi politik yang dirancang khusus untuk generasi muda. Aplikasi ini dapat menjadi platform yang interaktif, informatif, dan memberdayakan, yang memungkinkan generasi muda untuk terlibat secara lebih aktif dan bermakna dalam proses politik. Inisiatif ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya penetrasi smartphone dan internet di kalangan generasi muda Indonesia, yang mencapai 98% pada tahun 2023.¹⁴² Beberapa inisiatif aplikasi partisipasi politik telah mulai dikembangkan. Salah satu contohnya adalah "PolitikKita", sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh kolaborasi antara KPU, Bawaslu,

¹⁴¹ Wahyudi, A. et al. (2023). "Evaluasi Implementasi Program Siberkreasi: Studi Kasus di 5 Provinsi". *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, 8(2), 112-128.

¹⁴² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). "Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2023"

dan startup teknologi lokal.¹⁴³ Aplikasi ini menyediakan informasi real-time tentang proses pemilu, profil kandidat, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. "PolitikKita" dirancang sebagai platform digital yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara, khususnya generasi muda, dengan memanfaatkan teknologi mobile yang sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2023 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2024, dengan fokus utama pada peningkatan literasi politik dan fasilitasi partisipasi aktif dalam proses demokrasi.¹⁴⁴ Implementasi "PolitikKita" telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dalam enam bulan pertama sejak peluncurannya, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 5 juta kali, dengan tingkat engagement pengguna yang tinggi, terutama di kalangan pemilih muda berusia 17-35 tahun.¹⁴⁵ Inisiatif seperti "PolitikKita" menunjukkan potensi besar pemanfaatan kanal komunikasi digital dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi.

2) Integrasi layanan pemerintah dengan platform digital, telah menjadi langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, tetapi juga membuka peluang baru bagi partisipasi aktif generasi muda dalam proses demokrasi. Namun, untuk memaksimalkan peluang ini, diperlukan integrasi layanan pemerintah dengan platform digital yang relevan dan mudah diakses. Pemerintah perlu mengembangkan platform dan aplikasi digital yang terintegrasi dengan layanan publik. Hal ini dapat mencakup berbagai layanan seperti pengaduan masyarakat, informasi publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Integrasi ini telah mulai diimplementasikan melalui berbagai inisiatif, salah satu contoh yang menonjol adalah pengembangan platform "Digital Demokrasi" oleh

¹⁴³ KPU, Bawaslu, & TechnoID. (2023). "White Paper: Pengembangan Aplikasi PolitikKita"

¹⁴⁴ Bawaslu RI. (2023). "Strategi Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengawasan Pemilu 2024"

¹⁴⁵ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). "Survei Penggunaan Aplikasi Politik di Indonesia 2023-2024".

Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan startup teknologi lokal.¹⁴⁶ Platform ini mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah seperti e-voting, konsultasi publik online, dan sistem pelaporan transparansi anggaran, yang dapat diakses melalui aplikasi mobile yang ramah pengguna. Melalui platform ini, generasi muda dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Platform digital juga dapat menjadi sarana edukasi politik bagi generasi muda, meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu publik, dan mendorong partisipasi generasi muda dalam pemilu. Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 30% dalam partisipasi politik digital di kalangan pemilih muda dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁴⁷ Melalui integrasi yang komprehensif ini, diharapkan pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dapat secara efektif mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dengan mengembangkan platform dan aplikasi digital yang relevan, pemerintah dapat mempermudah akses generasi muda terhadap layanan publik, meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat demokrasi di era digital.

3) Sistem verifikasi informasi lintas platform menjadi komponen krusial dalam pengembangan platform dan aplikasi digital yang bertujuan untuk mendukung pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Di era post-truth, di mana informasi yang menyesatkan dan hoaks menjadi tantangan serius bagi demokrasi, keberadaan sistem verifikasi yang andal dan terintegrasi menjadi semakin penting. Generasi muda, sebagai pengguna aktif berbagai platform digital, memiliki peran signifikan dalam menyebarkan dan mengonsumsi informasi. Tanpa adanya mekanisme verifikasi yang efektif, mereka rentan terhadap manipulasi informasi yang dapat mengancam integritas proses demokratis.¹⁴⁸ Pengembangan sistem verifikasi informasi lintas platform

¹⁴⁶ Kementerian Dalam Negeri RI. (2023). "Laporan Pengembangan Platform Digital Demokrasi 2023"

¹⁴⁷ Badan Pusat Statistik. (2024). "Statistik Politik dan Keamanan: Partisipasi Politik Online 2023".

¹⁴⁸ Kurniawan, D., & Aprilia, S. (2023). "Perilaku Konsumsi Informasi Politik Generasi Z di Media Sosial". *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1), 45-60.

menjadi langkah strategis dalam memberdayakan generasi muda untuk berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam diskursus publik digital. Sistem verifikasi informasi lintas platform adalah mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa keakuratan dan keaslian informasi yang mereka temui di berbagai platform digital. Verifikasi informasi lintas platform memiliki peran penting dalam mengatasi penyebaran disinformasi dan misinformasi di kanal komunikasi digital. Hal ini pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar, mendorong dialog yang lebih sehat, dan mendukung partisipasi politik yang lebih bermakna. Generasi muda, sebagai pengguna aktif kanal komunikasi digital, memiliki peran penting dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem verifikasi informasi lintas platform. Dengan adanya sistem verifikasi informasi lintas platform yang efektif, generasi muda diharapkan dapat memanfaatkan kanal komunikasi digital secara lebih bertanggung jawab.

Hal ini pada gilirannya akan mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi melalui: Peningkatan kualitas diskursus publik digital, Penguatan partisipasi politik berbasis informasi yang terverifikasi, dan Mitigasi dampak negatif disinformasi terhadap proses demokratis. Sistem verifikasi informasi lintas platform merupakan pilar penting dalam pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda untuk konsolidasi demokrasi. Dengan menyediakan alat dan informasi yang dapat dipercaya, sistem ini dapat membantu generasi muda untuk menjadi warga digital yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan berdaya dalam memperkuat demokrasi.

Ketiga, Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Bersama. 1)

Forum multi-stakeholder untuk perumusan kebijakan menjadi instrumen krusial dalam pengembangan kebijakan dan regulasi bersama terkait pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda guna mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Urgensi forum multi-stakeholder semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya peran generasi muda dalam lanskap politik digital. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 78% pengguna internet di Indonesia berusia 16-30

tahun, dengan 65% di antaranya aktif menggunakan media sosial untuk mengakses informasi politik.¹⁴⁹ Hal ini menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap dinamika teknologi, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan dan perilaku generasi muda digital. Forum multi-stakeholder memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi generasi muda. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, forum ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, forum multi-stakeholder juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda, forum multi-stakeholder berperan penting dalam: Memfasilitasi pertukaran perspektif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memahami kompleksitas lanskap digital yang dihadapi generasi muda, Menyelaraskan berbagai inisiatif kebijakan dari different stakeholders untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif bagi partisipasi demokratis generasi muda, Mengembangkan pendekatan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren penggunaan media digital oleh generasi muda, dan Menciptakan ruang dialog untuk menjembatani perbedaan kepentingan dan mencapai kesepakatan bersama dalam perumusan kebijakan.¹⁵⁰ Forum multi-stakeholder merupakan mekanisme penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan inklusif terkait pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, forum ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat partisipasi politik generasi muda dan mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.

2) Harmonisasi regulasi demokrasi digital, mengacu pada upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam konteks demokrasi. Dengan tujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang koheren, jelas, dan efektif

¹⁴⁹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). "Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023".

¹⁵⁰ Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. (2024). "Evaluasi Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Digital Nasional".

dalam mengatur berbagai aspek demokrasi digital. Dalam lanskap regulasi yang ada, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang bersinggungan dengan isu demokrasi digital, seperti UU ITE, UU Pemilu, dan UU Penyiaran.¹⁵¹ Perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi politik generasi muda menuntut adanya harmonisasi dan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif. Harmonisasi regulasi terkait demokrasi digital memiliki beberapa manfaat penting antara lain; Memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi digital dalam konteks demokrasi, Meningkatkan efektivitas regulasi dengan menghindari tumpang tindih atau kontradiksi antar peraturan perundang-undangan, Mendorong inovasi teknologi digital dengan menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung dan kondusif, dan Menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, privasi, dan partisipasi politik, di era digital.

Disamping memiliki beberapa manfaat, Harmonisasi regulasi terkait demokrasi digital juga menghadapi beberapa tantangan, seperti: Teknologi digital terus berkembang dengan pesat, sehingga regulasi perlu adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut, Isu-isu terkait demokrasi digital sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan teknologi, dan Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, hal ini dapat menghambat proses harmonisasi regulasi. Proses harmonisasi regulasi ini memerlukan pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan Pemerintah, Legislatif, Masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan Generasi muda. Harmonisasi regulasi terkait demokrasi digital merupakan langkah penting dalam memastikan pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda untuk konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dengan menciptakan kerangka hukum yang koheren, jelas, dan efektif, harmonisasi regulasi dapat mendorong pemanfaatan teknologi digital yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkontribusi pada penguatan demokrasi.

3) Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber, Generasi muda yang tumbuh di era digital, memiliki peran dalam memanfaatkan kanal

¹⁵¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). "Kompilasi Peraturan Perundang-undangan terkait Tata Kelola Digital".

komunikasi digital untuk memperkuat demokrasi. Pemanfaatan ini harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan data pribadi dan keamanan siber untuk mencegah penyalahgunaan dan ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook telah menjadi ruang publik digital yang vital bagi generasi muda. Melalui platform media manistrem ini, dapat menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan menggalang dukungan untuk isu-isu yang dipedulikan.¹⁵² Penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa setiap unggahan di media sosial dapat meninggalkan jejak digital yang dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, generasi muda perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan menjaga keamanan akun mereka. Jaringan digital memungkinkan generasi muda berkolaborasi dengan individu dan kelompok dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Perlindungan data pribadi dan keamanan siber merupakan dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan kanal komunikasi digital, perlu memahami hak-hak terkait data pribadi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data dari penyalahgunaan. Generasi muda juga perlu memahami ancaman keamanan siber seperti phishing, malware, dan ransomware, serta cara-cara untuk melindungi diri dari ancaman tersebut sehingga dapat berkontribusi secara positif dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis PESTLE, dimana Strategi pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek PESTLE, sebagai berikut :

1. Politik (Political)

Analisis:

- a. Dinamika politik identitas masih kuat dalam lanskap politik Indonesia.
- b. Keterlibatan generasi muda dalam proses politik masih

¹⁵² Dahlgren, P. (2005). The Internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation. *Political Communication*, 22(2), 147-162.

terbatas.

- c. Potensi manipulasi informasi politik melalui kanal digital.

Solusi:

- a. Membentuk forum multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan generasi muda untuk merumuskan kebijakan demokrasi digital.
- b. Mengembangkan kurikulum bersama tentang literasi digital dan politik yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal dan non-formal.
- c. Mendorong partai politik untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda melalui platform digital.

2. Ekonomi (Economic)

Analisis:

- a. Ketimpangan akses internet dan perangkat digital antar daerah.
- b. Potensi ekonomi digital yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung partisipasi politik.
- c. Biaya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital untuk demokrasi.

Solusi:

- a. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur digital demokrasi, termasuk platform dan aplikasi yang mendukung partisipasi politik.
- b. Memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan teknologi yang berkontribusi dalam pengembangan solusi demokrasi digital.
- c. Mengintegrasikan layanan pemerintah dengan platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

3. Sosial (Social)

Analisis:

- a. Kesenjangan literasi digital antar generasi dan kelompok sosial.

- b. Potensi polarisasi sosial akibat informasi yang terdistorsi di media sosial.
- c. Kebutuhan akan etika berkomunikasi di ruang digital.

Solusi:

- a. Mengembangkan program pemberdayaan literasi digital yang berfokus pada etika berkomunikasi dan berpikir kritis.
- b. Mendorong kolaborasi antar generasi dalam program literasi digital untuk menjembatani kesenjangan pemahaman.
- c. Mengadakan kampanye sosial tentang pentingnya verifikasi informasi lintas platform.

4. Teknologi (Technological)

Analisis:

- a. Perkembangan pesat teknologi komunikasi digital dan media sosial.
- b. Kebutuhan akan platform yang aman dan terpercaya untuk partisipasi politik.
- c. Tantangan dalam memverifikasi informasi di era berita palsu.

Solusi:

- a. Mengembangkan platform dan aplikasi demokrasi digital yang terintegrasi, aman, dan mudah digunakan.
- b. Menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam proses demokrasi digital.
- c. Mengembangkan sistem verifikasi informasi lintas platform menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning.

4. Legal (Legal)

Analisis:

- a. Kebutuhan akan regulasi yang mengatur demokrasi digital.
- b. Tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan pencegahan penyalahgunaan platform

digital.

- c. Isu perlindungan data pribadi dalam partisipasi politik digital.

Solusi:

- a. Melakukan harmonisasi regulasi demokrasi digital dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- b. Memperkuat undang-undang perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
- c. Mengembangkan mekanisme hukum yang efektif untuk menanggapi pelanggaran dalam ruang digital politik.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Namun, potensi ini perlu dikelola dengan baik melalui : Memperluas akses terhadap infrastruktur digital dan menyediakan perangkat yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, Melaksanakan program pendidikan literasi digital yang komprehensif di semua jenjang pendidikan, Menyusun regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur penggunaan platform digital, melindungi privasi pengguna, dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, dan Membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, namun hal ini memerlukan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, inklusif, dan produktif.
- b. Demokrasi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi, sejumlah faktor yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi dalam era digital, termasuk peran media sosial, e-partisipasi, dan literasi digital. pemanfaatan digital memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik, pengawasan publik, dan transparansi pemerintahan. Namun, di sisi lain, muncul tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan ancaman terhadap privasi. Untuk memaksimalkan potensi digital dalam memperkuat demokrasi, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan

sektor swasta dalam membangun literasi digital, mengembangkan infrastruktur yang memadai, serta merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

- c. Generasi muda sebagai *digital native* memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan demokrasi. Pemanfaatan kanal komunikasi digital oleh generasi muda dapat menjadi katalisator bagi terciptanya ruang publik yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya strategis seperti: Membekali generasi muda dengan kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menciptakan konten digital secara kritis, Membangun platform yang mendukung partisipasi politik, melindungi privasi, dan mencegah penyebaran hoaks, Menyusun regulasi yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kepentingan publik, Membekali generasi muda dengan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan hoaks, serta mempromosikan budaya dialog dan toleransi, dan Membangun kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan mendukung demokrasi. Dengan meningkatkan partisipasi politik yang inklusif, mendorong diskusi publik yang berkualitas, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas, demokrasi digital dapat menjadi katalis untuk mewujudkan sistem demokrasi yang lebih responsif dan representatif.

17. Rekomendasi.

- a. **Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika,**
- 1) Meningkatkan Aksesibilitas dengan memperluas jangkauan internet ke seluruh pelosok Indonesia, terutama daerah pedesaan dan terpencil, menyediakan fasilitas publik dengan akses internet gratis di tempat-tempat strategis.

- 2) Mengembangkan Literasi Digital dengan membuat program pendidikan literasi digital yang komprehensif dan inklusif, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan melibatkan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil dalam penyuluhan literasi digital.
- 3) Menciptakan konten politik yang menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh generasi muda. Menggunakan bahasa yang santai (bahasa gaul), visual yang menarik, dan format konten yang interaktif seperti video pendek, infografis, atau podcast.
- 4) Membangun platform digital yang aman dan inklusif untuk diskusi dan debat publik, melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi online, jajak pendapat, atau forum diskusi.
- 5) Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi, melindungi data pribadi pengguna dan privasi di ruang digital.

b. Kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

- 1) Mengembangkan aplikasi mobile yang menarik dan interaktif untuk memberikan informasi terkini tentang proses pemilu dan pendidikan politik.
- 2) Memanfaatkan media sosial secara aktif untuk menyebarkan konten edukatif tentang demokrasi dan kepemimpinan yang sesuai dengan minat generasi muda.
- 3) Menyelenggarakan webinar dan diskusi online dengan tokoh-tokoh inspiratif untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda.

c. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- 1) Membuat konten kreatif di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk menjelaskan prosedur pemilu dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.
- 2) Mengadakan kompetisi konten digital bertema demokrasi dan

pemilu untuk mendorong keterlibatan aktif generasi muda.

- 3) Mengoptimalkan website dan aplikasi KPU dengan fitur-fitur interaktif yang memudahkan akses informasi bagi pemilih muda.

d. Kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

- 1) Membentuk tim khusus pemantau media sosial untuk mendeteksi dan merespons cepat terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan terkait pemilu.
- 2) Meluncurkan kampanye digital #PemiluBersih untuk mendorong partisipasi generasi muda dalam pengawasan pemilu.

e. Institusi Terkait (Lembaga Pendidikan, NGO Pengawas Pemilu, Media Massa).

- 1) Mengintegrasikan Literasi Digital ke Kurikulum formal dan non-formal, mengajarkan keterampilan berpikir kritis, evaluasi informasi, dan etika digital kepada generasi muda.
- 2) Menciptakan Ruang diskusi yang aman dengan menyediakan platform digital yang netral dan inklusif untuk diskusi politik.
- 3) Memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya dengan membuat konten jurnalistik yang berkualitas dan berimbang, memberikan edukasi publik tentang cara membedakan informasi yang valid dari hoaks.

f. Generasi Muda:

- 1) Meningkatkan Literasi Digital dengan mempelajari keterampilan literasi digital secara mandiri melalui sumber belajar online atau pelatihan.
- 2) Berpartisipasi Aktif menggunakan kanal komunikasi digital untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, menyampaikan aspirasi, dan mengawal kebijakan publik.

- 3) Berpikir kritis, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di ruang digital, mengecek kebenarannya dari sumber-sumber terpercaya.
- 4) Menjadi Agen Perubahan dengan menggunakan kanal komunikasi digital secara positif dan bertanggung jawab untuk memperkuat demokrasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahan ajaran Lemhannas RI bidang studi 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa.

Sinpeng, A. (2022). *Digital Democracy in Southeast Asia: Technology, Politics and Disruption*. Cambridge University Press.

Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.

Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge University Press.

Coleman, S. (2004). *The Political System in the Digital Age*. Routledge.

Margolis, M., & Resnick, D. (2000). *Politics as Usual: The Cyberspace Revolution*. Sage Publications

Linz, Juan J., and Alfred Stepan. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.

Jurnal

Juditha, C. (2023). *Pemilih Muda dan Informasi Palsu Terkait Politik: Studi Kasus Menjelang Pemilu 2024*. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 14(1), 45-62.

Haryanto, H. C., Rahmania, T., Mubarak, A. R., Nakon, A. B., & Pratama, B. (2019). *Peran Media Sosial dalam Penguatan Identitas Nasional Indonesia*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 344-366.

Sukma, R. (2019). *Polarisasi Politik di Media Sosial: Studi Kasus Pilpres 2019*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 101-115.

Kruse, L. M., Norris, D. R., & Flinchum, J. R. (2018). *Social media as a public sphere? Politics on social media*. *Sociological Quarterly*, 59(1), 62–84. <https://doi.org/10.1080/00380253.2017.1383143>

Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (2020). *Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter*. *Studying Politics Across Media*,

50–74. <https://doi.org/10.4324/9780429202483-4>”

Peraturan perundang-undangan

UUD NRI 1945 (Amandemen) pasal 28F setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 2.

Artikel

Anggraini, D. (2024). Pemilu 2024 selesai, Perlukah Konsolidasi Demokrasi? Departemen Ilmu politik Universitas Andalas

Retnowati, E. (2012). "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)." *Perspektif*, 17(1), 54-61.

Nuraeni, Nuraeni1906kencana@gmail.com. (2024). Peran Media Sosial Dalam Demokrasi Masa Kini. *Tuturan*, 2(1), 216-222. DOI: <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i4.777>

Dahlberg, L. (2011). Re-constructing digital democracy: An outline of four 'positions'. *New Media & Society*, 13(6), 855-872. [4] Loader, B. D.,

Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*,

Bofa, M., Wawan Budi, D., & Sudirman, A. (2022). Data Rights di Era Surveillance Capitalism: Skandal Data Cambridge Analytica & Facebook dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(2), 144–159.

<https://doi.org/10.31947/hjirs.v2i2.22686>

Internet

We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: Indonesia.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Laporan Survei Internet APJII 2021-2022.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2023). Proyeksi Pemilih Pemula dan Generasi Muda Pemilu 2024.

Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.

Nett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739-768.

Kominfo. (2021). Indeks Literasi Digital Indonesia 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. (2023). Laporan Tahunan Program Indonesia Youth Connect.

<https://www.gramedia.com/literasi/media-komunikasi/>

https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/278037/perpres-no-32-tahun-2024>

Ibid.

We Are Social & Hootsuite. (2024). Digital 2024: Global Digital Overview.

Pew Research Center. (2024). Teens, Social Media and Technology 2024.

GlobalWebIndex. (2024). Social Media Trends Among Gen Z.

Anderson, M., & Jiang, J. (2024). Teens, Social Media & Technology 2024. Pew Research Center.

We Are Social & Hootsuite. (2024). Digital 2024: Global Digital Overview.

Ibid.

App Annie. (2024). State of Mobile 2024 Report.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan Survei

Internet APJII 2022-2023

Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Laporan Survei awal 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). Laporan Penggunaan Aplikasi KPU dalam Pemilu 2024.

Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. (2023). Studi Perilaku Politik Change.org Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Petisi Online 2023.

Center for Innovation Policy and Governance (CIPG). (2024). Studi Tren Kampanye Digital di Indonesia 2023-2024.

Asosiasi Podcast Indonesia. (2024). Survei Pendengar Podcast Politik 2023-2024.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). Laporan Partisipasi Pemilih Pemilu 2024.

Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Preferensi Politik Generasi Muda Indonesia.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). Laporan Partisipasi Pemilih Pemilu 2024.

Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Preferensi Politik Generasi Muda Indonesia.

Kemp, S. (2024). Digital 2024: Indonesia. We Are Social & Hootsuite

Puskapol UI. (2024). Studi Efektivitas Kampanye Digital dalam Pemilu 2024.

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143-150.

Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Johns Hopkins University Press.

Maryoto, A. (2021). Cambridge Analytica, Pegasus, dan Teknologi Pengancam Demokrasi. Kompas.Com.

https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/22/cambridge-analytica-pegasus-dan-teknologi-pengancam-demokrasi?open_from=Search_Result_Page

Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E. (2018). The Cambridge Analytica files.

The Guardian. <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war->

- whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-trump
- Yoga, A. (2018). Menyingkap Konspirasi Rusia di Pilpres AS. Kompas.Com.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2018/07/18/menyingkap-konspirasi-rusia-di-pilpres-as>
- Statista. (2022). Number of registered voters between 2019 and 2022 national elections in the Philippines(in millions). Statista.
<https://www.statista.com/statistics/1308036/philippines-total-of-registered-voters/>
- KUNCAHYONO, T. (2022). Medsos dan Kemenangan "Bongbong".
Kompas.Com. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/05/12/medsos-dan-kemenangan-bongbong>
- Aljazeera. (2020). Thailand's Lese Majeste Law. Aljazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/thailands-lese-majeste>
- Kongkirati, P., & Kanchoochat, V. (2018). The Prayuth Regime: Embedded Military and Hierarchical Capitalism in Thailand. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 6(2), 279–305.
<https://doi.org/10.1017/trn.2018.4>
- Chachavalpongpun, P. (2020). Constitutionalizing the Monarchy: Uncompromising Demands of Thai Protesters. *Journal of International Affairs*, 73(2), 163–172. <https://www.jstor.org/stable/26939972>
- Fitriyah. (2020). Ruang Publik, Politik Identitas dan Kerumitan Komunikasi. *Jurnal Kontekstual*, 5(1), 1-12
- Prasetya, A. (2019). Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu. *Prosiding Comnews*, 21(1), 1-12.
- Andriansyah, A. P., Herawati, A., Nabila, B., Ilham, M. R., Fathurrohman, M. W., Mulya, R., & Suryakencana, U. (2024). Perlindungan Hak Informasi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2024 Dikaitka n Dengan Problematika ‘ Sirekap ’ Sebagai Sarana Informasi Alternatif. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 320–333.
- Laporan Bawaslu RI. (2024). Temuan Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur.
- KPU RI. (2024). Pernyataan Resmi tentang Kasus Surat Suara di Kuala Lumpur.

- Alizen, A. N., Raisuddin, Gendiswardani, R. D. A., Nihru, S. S. H., & Akbar, R. A. M. (2023). Prospek Penggunaan Tiktok Sebagai Instrumen Politik Pada Pemilihan Umum 2024. LABORATORIUM INDONESIA 2045
- TikTok Newsroom. (2024). TikTok's Role in Indonesian Presidential Election 2024.
- Lembaga Survei Indonesia. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Preferensi Politik Generasi Z dan Milenial
- Konsep "das sollen" dan "das sein" berasal dari filsafat Jerman, yang sering digunakan dalam konteks teori hukum dan politik. Lihat: Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. University of California Press.
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2011). Networking Democracy? Social media innovations and participatory politics. *Information, Communication & Society*, 14(6), 757-769.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Laporan Survei Internet APJII 2021-2022.
- We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: Indonesia.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan Survei Internet APJII 2022-2023. Jakarta: APJII.
- Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. (2024). Peran Media Digital dalam Partisipasi Politik Generasi Muda Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Laporan Indeks Literasi Digital Nasional 2023.
- Deloitte Global. (2023). Digital Media Trends, 17th edition
- Reuters Institute. (2024). Digital News Report 2024.
- Lembaga Survei Indonesia. (2024). Perilaku Politik Digital Generasi Muda Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Laporan Penggunaan TIK dan Implikasinya terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2023). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. Cambridge University Press.
- Krisdamarjati, Y. A. (2023). Tiga Kriteria Penting Komunikasi Politik Melalui Media

- Sosial. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/07/tiga-kriteria-penting-komunikasi-politik-melalui-media-sosial>
- Arlinta, P. (2024). Pemilu Indonesia dalam angka, Pesta Demokrasi Satu Hari Terbesar di Dunia. Kompas.Com.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/14/pemilu-dalam-angka-pesta-demokrasi-satu-hari-terbesar-di-dunia>
- Dimock, M. (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Pew Research Center.
- Fry, R. (2018). Millennials projected to overtake Baby Boomers as America's largest generation. Pew Research Center.
- Deloitte. (2020). The Deloitte Global Millennial Survey 2020.
- Ibid.
- Alvara Research Center. (2023). Survei Nasional: Pandangan Generasi Muda terhadap Pemilu 2024.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021). Voters and Voting Behavior in Indonesia: Change and Continuity.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Laporan Survei: Persepsi Pemilih Muda terhadap Pemilu 2024.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023.
- Barber, B. R. (2001). The uncertainty of digital politics. Harvard International Review, 23(1), 42.
- Chadwick, A., & Howard, P. N. (2009). Routledge handbook of Internet politics. Routledge London.
- Tandoc Jr, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "fake news": A typology of scholarly definitions. Digital Journalism, 6(2), 137-153.
- Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjanto, tentang istilah hoaks dalam dunia digital seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). Analisis Ancaman Siber dan Operasi Pengaruh Digital terhadap Pemilu 2024. Jakarta: BSSN
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Studi tentang Echo Chambers dalam Media Sosial Indonesia. Jakarta: Kemkominfo.

CSIS Indonesia. (2023). Survei Nasional: Polarisasi Politik di Era Digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Laporan Tahunan Penanganan Disinformasi 2023.

AI Lab UGM. (2024). Analisis Sentimen Diskursus Politik Online 2023-2024

Lembaga Survei Indonesia. (2024). Survei Nasional: Partisipasi Politik Generasi Muda.

Pew Research Center. (2023). Social Media and Political Engagement.

United Nations E-Government Survey. (2022). Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development.

Kementerian PANRB. (2023). Laporan Tahunan LAPOR!

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Pengaduan Publik

Election Integrity Partnership. (2021). The Long Fuse: Misinformation and the 2020 Election

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). Laporan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Pew Research Center. (2023). Digital Politics: How Young Adults Get Their Political News.

Vote Smart. (2023). Annual Report on Voter Education and Engagement.

Drone Emprit Academic. (2022). Analisis Media Sosial: Tren #TransparansiAPBN pada Debat Anggaran Nasional 2022.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023.

We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: Indonesia.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe.

Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What's the difference? Journal of New Approaches in Educational

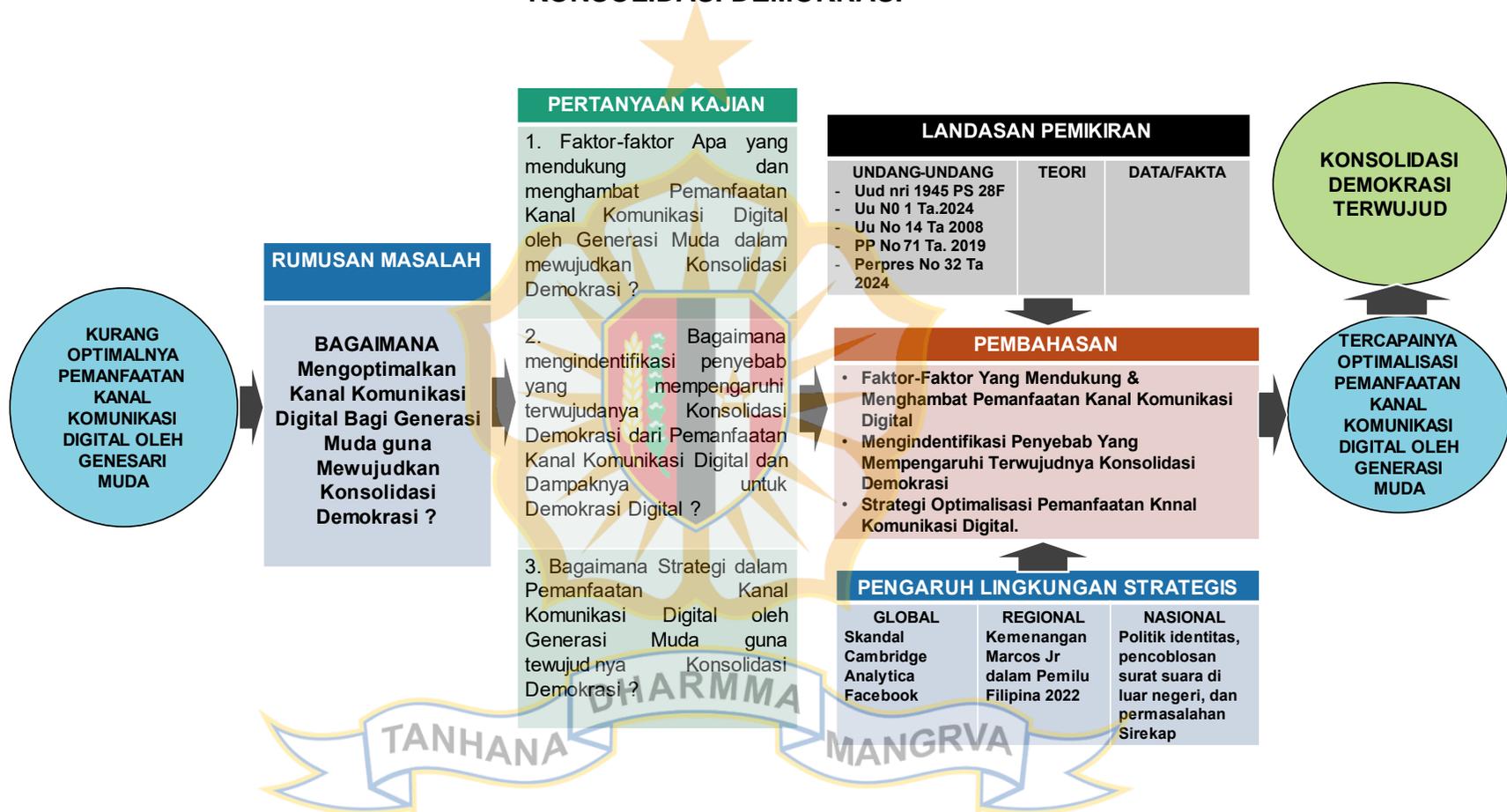
- Research, 10(1), 15-27.
- Van Dijk, J. A., & Van Deursen, A. J. (2014). *Digital skills: Unlocking the information society*. Palgrave Macmillan.
- Wahyudi, A. et al. (2023). "Evaluasi Implementasi Program Siberkreasi: Studi Kasus di 5 Provinsi". *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, 8(2), 112-128.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). "Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2023"
- KPU, Bawaslu, & TechnoID. (2023). "White Paper: Pengembangan Aplikasi PolitikKita"
- Bawaslu RI. (2023). "Strategi Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengawasan Pemilu 2024"
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). "Survei Penggunaan Aplikasi Politik di Indonesia 2023-2024".
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2023). "Laporan Pengembangan Platform Digital Demokrasi 2023"
- Badan Pusat Statistik. (2024). "Statistik Politik dan Keamanan: Partisipasi Politik Online 2023".
- Kurniawan, D., & Aprilia, S. (2023). "Perilaku Konsumsi Informasi Politik Generasi Z di Media Sosial". *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1), 45-60.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). "Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023".
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. (2024). "Evaluasi Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Digital Nasional".
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). "Kompilasi Peraturan Perundang-undangan terkait Tata Kelola Digital".
- Dahlgren, P. (2005). The Internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation. *Political Communication*, 22(2), 147-162.
- KataData. (2023). *Kpu: pemilih pemilu 2024 didominasi oleh kelompok gen z dan milenial*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/07/05/Kpu-Pemilih-Pemilu-2024-Didominasi- Oleh-Kelompok-Gen-Z-Dan-Milenial>.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri*.

- Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih#:~:text=Betty pun melanjutkan dengan membacakan,-Indonesia sebanyak 203.056.748>.
- Maryoto, A. (2021). *Cambridge Analytica, Pegasus, dan Teknologi Pengancam Demokrasi*. Kompas.Com.
https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/22/cambridge-analytica-pegasus-dan-teknologi-pengancam-demokrasi?open_from=Search_Result_Page
- Muhammad, N. (2023). *KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial*. Databoks.Katadata.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>
- Nicholas Aditya, I. (2024). *KPU Sebut Partisipasi Pemilih untuk Pilpres dan Pileg di Atas 81 Persen*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/13094131/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-untuk-pilpres-dan-pileg-di-atas-81-persen>
- Nurhasim, M. (2023). *2024: Pemilu Kita Masa Depan Kita, Memaknai Pemilu Lintas Generasi*. <https://stialan.ac.id/v3/2024-pemilu-kita-masa-depan-kita-memaknai-pemilu-lintas-generasi/>
- Oktafian, I. (2024). *CSIS: Ada 114 Juta Pemilih Muda di 2024, yang Minat Ikut Parpol Cuma 1,1%*. Detik.Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-6618283/csis-ada-114-juta-pemilih-muda-di-2024-yang-minat-ikut-parpol-cuma-1-1>
- Pangrazio, L., & Selwyn, N. (2018). "It's Not Like It's Life or Death or Whatever": Young People's Understandings of Social Media Data. *Social Media and Society*, 4(3). <https://doi.org/10.1177/2056305118787808>
- munication in the online world: Theoretical approaches and research designs. In *Political Communication in the Online World: Theoretical Approaches and Research Designs*. <https://doi.org/10.4324/9781315707495>
- Whelan, E., Najmul Islam, A. K. M., & Brooks, S. (2020). Is boredom proneness related to social media overload and fatigue? A stress-strain-outcome approach. *Internet Research*, 30(3), 869–887.
<https://doi.org/10.1108/INTR-03-2019-0112>

- Yolency. (2024). *Peran Penting Gen Z dan Milenial Menuju Tatanan Politik Baru pada Pemilu 2024 | Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban*. <https://Tubankab.Go.Id/>. <https://tubankab.go.id/entry/peran-penting-gen-z-dan-milenial-menuju-tatanan-politik-baru-pada-pemilu-2024>
- Howe, N., & Strauss, W. (2000). *Millennials Rising: The Next Great Generation*. Vintage Books.
- Stillman, D., & Stillman, J. (2017). *Gen Z @ Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace*. Harper Business.
- Wahyuni, I. R. (2019). Disinformasi di Media Sosial: Studi Kasus Penyebaran Berita Palsu tentang Vaksinasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 121-135.
- Astuti, D. P. (2020). Misinformasi dan Disinformasi di Era Digital: Tantangan bagi Jurnalisme dan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 24(1), 45-58.
- Siregar, H. (2018). Hoax dan Post-Truth Politics di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 101-115.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia.
- Subiakto, Henry. *Politik Digital: Komunikasi Politik dan Demokrasi di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023-2024," (Jakarta: APJII, 2024).
- Wicaksono, A. S. (2022). Politik Populer di Era Digital: Studi tentang Pengaruh Influencer dan Selebriti Online terhadap Preferensi Politik Generasi Muda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 121-135.
- M. Alfian Alfian, "Demokrasi Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 231-250.
- Nasrullah, R. (2023). *Clicktivism* dan Partisipasi Politik Digital Generasi Muda di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 121-135.

ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PEMANFAATAN KANAL KOMUNIKASI DIGITAL BAGI GENERASI MUDA GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI



DAFTAR LINK TENTANG PEMANFAATAN DIGITAL

1. <https://www.youtube.com/watch?v=TAC4yV7ogd0> (pengawasan pemilu partisipatif bawaslu kabupaten takalar)
2. https://www.youtube.com/watch?v=QIVxK_01rLs (Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tahapan Pemilu 2024 "Pemilih Pemula")
3. <https://www.youtube.com/watch?v=4AYPIIP4SOY> (jangan golput dan gunakan hak pilihmu pada pemilu 2024 ya #temanpemilih)
4. <https://www.youtube.com/watch?v=MWvOviBSbYs> (Ayo Pilih Jangan Golput)
5. <https://www.youtube.com/watch?v=fJalRm45gOY> (Pantau dan Awasi Pemilu Serentak 2024)
6. <https://www.youtube.com/watch?v=xuKhxwyJcqE> (Bijak Bermedia sosial)
7. <https://www.youtube.com/watch?v=vRHBZO-Zroc> (dampak negatif penggunaan gadget)
8. <https://www.youtube.com/watch?v=r4nR0MwDWmo> (Misinformasi yang Menyebabkan Terjadinya Hoax)
9. <https://www.youtube.com/watch?v=bVdzpjPzcNM> (Stop Hoaks)

